



# LAPORAN KINERJA (LKJ) KECAMATAN PELAIHARI TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
KECAMATAN PELAIHARI  
2024**

## RINGKASAN EKSEKUTIF



Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas perkenanNya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 telah diselesaikan. Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 yang didasari oleh:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan dan semoga perbaikan laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Kecamatan Pelaihari untuk masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur peningkatan kinerja dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berkelanjutan.

Pelaihari, Januari 2024

**CAMAT PELAIHARI,**

**AGUS SETYO, SSTP, M.M**  
**Pembina/ (IV/A)**  
**NIP. 19850808 200412 1 001**

## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR GRAFIK .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN .....	1
C. DASAR HUKUM.....	2
D. CASCADING KINERJA.....	2
E. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi .....	3
F. ISU STRATEGIS.....	18
G. PRODUK DAN LAYANAN.....	20
H. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN .....	21
I. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA.....	24
J. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	25
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	26
A. VISI RPJMD .....	26
B. MISI RPJMD .....	28
C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA.....	29
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 .....	32
E. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA .....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	37
A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI .....	37
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	79
BAB IV PENUTUP .....	82
A. SIMPULAN.....	82
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. IKU	
2. PERNYATAAN HASIL REVIU	

3. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 2023
4. CASCADING / POHON KINERJA
5. CAPAIAN PERTRIWULAN (1-4)
6. MONEV RENSTRA
7. MATRIKS KESELARASAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar Jabatan, Esselon , Status Kepegawaian Dan Jumlah PNS/Non PNS Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari.....	15
Tabel 2.	Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan golongan Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari.....	16
Tabel 3.	Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari.....	17
Tabel 4.	Daftar Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana Prasarana Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari.....	17
Tabel 5	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah SKPD Kecamatan Pelaihari .....	19
Tabel 6.	Dukungan SDM, Sarana Prasarana Dan Anggaran pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2023.....	21
Tabel 7.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 .....	24
Tabel 8.	Sasaran strategis Kantor Kecamatan Pelaihari .....	29
Tabel 9.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pelaihari .....	30
Tabel 10.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari .....	31
Tabel 11.	Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, baik Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2023.....	32
Tabel 12.	Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2022.....	34
Tabel 13.	Pengelompokan Capaian Kinerja .....	38
Tabel 14.	Realisasi Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2023.....	38
Tabel 15.	Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Pelaihari Tahun 2023.....	39
Tabel 16.	Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kecamatan Pelaihari .....	42
Tabel 17.	Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari Tahun 2023.....	42
Tabel 18.	Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KecamatanPelaihari Tahun 2018-2023 .....	43
Tabel 19.	Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023 .....	45

Tabel 20.	Sasaran Strategis, Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Sekretariat Kecamatan Pelaihari.....	47
Tabel 21.	Realisasi, Target, Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Kecamatan Pelaihari .....	47
Tabel 22.	Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 berdasarkan Komponen penilaian .....	48
Tabel 23.	Realisasi Capaian SAKIP Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 Dan Persentase Capaian Kinerja Terhadap Target SAKIP Tahun 2023. ....	49
Tabel 24.	Sumber Daya Manusia pada Bagian Sekretariat .....	49
Tabel 25.	Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023 .....	50
Tabel 26.	Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Tata Pemerintahan TA. 2023 .....	51
Tabel 27.	Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023 .....	53
Tabel 28.	Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa TA. 2023 .....	54
Tabel 29.	Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023 .....	57
Tabel 30.	Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Kemasyarakatan TA. 2023 .....	59
Tabel 31.	Realisasi Program Penunjang pada Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023 .....	61
Tabel 32.	Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban TA. 2023 .....	62
Tabel 33.	Realisasi Program Penunjang pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023 .....	64
Tabel 34.	Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pelayanan TA. 2023 .....	65
Tabel 35.	Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2023.....	66
Tabel 36.	Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Sub Umum dan Kepegawaian TA. 2023.....	68
Tabel 37.	Realisasi Program Penunjang pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023 .....	70

Tabel 38.	Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Sub Perencanaan dan Keuangan TA. 2023.....	71
Tabel 39.	Realisasi Program Penunjang pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023 .....	72
Tabel 40.	Realisasi Target Indikator Kinerja Eselon IV Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2022-2023 .....	74
Tabel 41.	Realisasi Anggaran Kecamatan Pelaihari Tahun 2023.....	77
Tabel 42.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023 .....	79
Tabel 43.	Sasaran Strategis, Program, Pagu dan Realisasi Kecamatan Pelaihari .....	79
Tabel 44.	Realisasi Persentase Keuangan, Fisik dan Efisiensi Sasaran Strategis Kecamatan Pelaihari Tahun 2023.....	80
Tabel 45.	Perbandingan Program dan Kegiatan serta Pagu Anggaran Kecamatan Pelaihari Tahun 2022-2023.....	80
Tabel 46.	Perbandingan Realisasi Belanja dan Pendapatan pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2022-2023 .....	81

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pelaihari.....	4
Gambar 2.	Pelaksanaan Aksi Damai Pemilihan Kepala Desa.....	52
Gambar 3.	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Pelaihari .....	55
Gambar 4.	Pelaksanaan Musrenbang Desa di Kecamatan Pelaihari .....	55
Gambar 5.	Pelaksanaan Evaluasi APBDes di Kecamatan Pelaihari .....	56
Gambar 6.	Kafilah MTQ Kecamatan Pelaihari pada MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 di Kecamatan Bati-bati.....	60
Gambar 7.	Safari Ramadhan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut dengan Masyarakat Desa Sumber Mulya pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 .....	60
Gambar 8.	Operasi Gabungan Penertiban Warung Malam .....	63
Gambar 9.	Mediasi izin Pendirian Tempat Ibadah.....	63
Gambar 10.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut .....	67



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Realisasi dan Target IKM Tahun 2018-2023.....	44
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2026 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari sebagai wujud dari pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2023 ini adalah :

- a. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2023
- b. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023

Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja adalah :

- a. Untuk pengambilan Keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan, untuk efisinsi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggaran.
- b. Untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Pelaihari di masa yang akan datang.

### **C. DASAR HUKUM**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 didasari atas :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, yang dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan.

### **D. CASCADING KINERJA**

Cascading Kinerja Kecamatan Pelaihari tahun 2023 digambarkan dalam bentuk urutan tingkatan berjenjang dari Tujuan, sasaran dan Indikator Esselon III sampai dengan Esselon IV dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Pelaihari memiliki 3 (tiga) Tujuan Strategis dengan 3 (tiga) Indikator Tujuan
2. Kecamatan Pelaihari memiliki 1 (satu) Sasaran Strategis Eselon III (Camat) dengan 1 (satu) Indikator Sasaran Eselon III (Camat).
3. Kecamatan Pelaihari memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis Eselon III (Sekretaris Camat) dengan 5 (lima) Indikator Sasaran Eselon III (Sekretaris Camat).
4. Kecamatan Pelaihari memiliki 23 (dua puluh tiga) Sasaran Strategis Eselon IV dengan 23 (dua puluh tiga) Indikator Sasaran Eselon IV.

#### **E. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi**

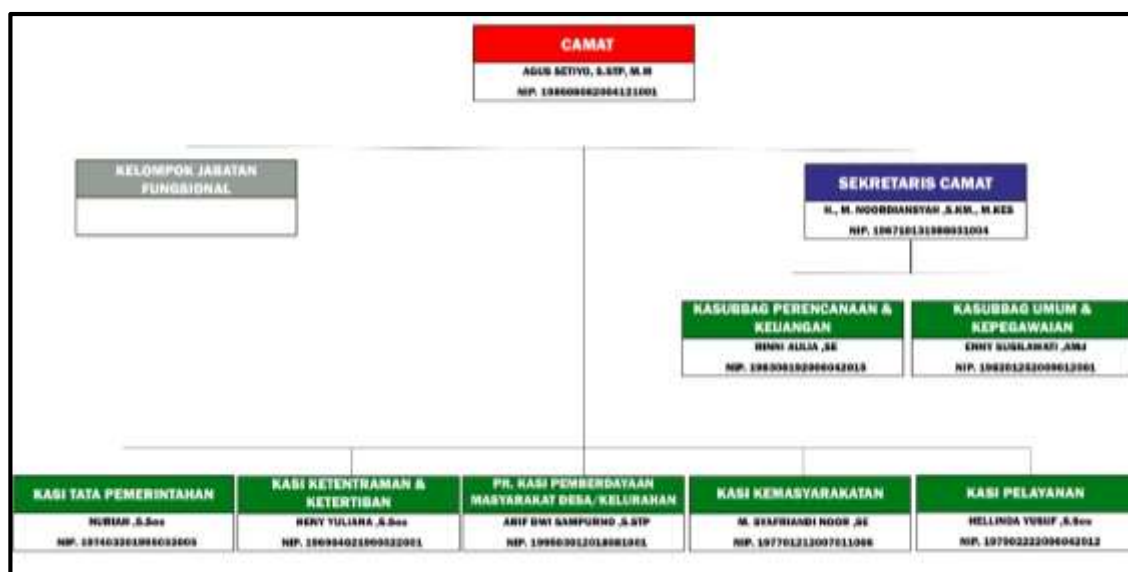
Kecamatan Pelaihari dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

Struktur organisasi Kecamatan Pelaihari disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kecamatan Pelaihari disusun dengan struktur organisasi yang terdiri dari :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan
- 6) Seksi Kemasyarakatan
- 7) Seksi Pelayanan
- 8) Kelompok jabatan fungsional
- 9) Kelurahan

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pelaihari dapat dilihat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Pelaihari

Sekretariat kecamatan adalah unsur staf dan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi-seksi pada kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada Camat. Kelompok Jabatan Fungsional ditunjuk oleh Bupati atau pejabat lainnya sesuai dengan bidang keahliannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, dimana Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah-wilayah kerja dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya yang berada dibawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, dimana Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah, untuk melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut

:

- a. Menetapkan perencanaan strategis kecamatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengoordinasikan membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan umum dan masyarakat di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- i. Mengoordinasikan kegiatan dalam bidang penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah kecamatan;
- j. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- k. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembinaan keagrariaan, dan pembinaan politik dalam negeri;

- l. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- n. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- o. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan;
- p. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Kecamatan Pelaihari untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri dari :

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat Kecamatan Pelaihari dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Kecamatan, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelola urusan administrasi kepegawaian. Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan Penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset kecamatan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
  - i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
  - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
  - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya
- Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Sekretariat Kecamatan Pelaihari dilengkapi dengan 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

**1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan keuangan dan mengelola keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan. Adapun uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran kecamatan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik kecamatan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan



Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- j. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- k. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- l. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- m. melaksanakan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- p. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## **2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

## **2. Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- d. melaksanakan sebagian tugas dalam hal pajak bumi dan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas bidang pertanahan di kecamatan;
- f. melakukan penataan dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan;
- h. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan di wilayah kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memproses pelayanan administrasi kependudukan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- k. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu lingkup kecamatan meliputi pemilihan kepala desa dan penjaringan aparatdesa;
- m. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi instansi di daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada;
- n. mengoordinasikan persiapan dalam rangka pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional/daerah;
- o. menyiapkan bahan dan memfasilitasi perselisihan antar desa bidang pemerintahan;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tata Pemerintahan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. mengolah dan memproses rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- f. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- h. menyiapkan bahan materi penyuluhan mengenai ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan wilayah Kecamatan;
- i. melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan;
- j. mengolah dan memproses surat ijin penutupan jalan tertentu, ijin parkir tidak tetap, surat jalan dan surat keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya;
- k. memberdayakan potensi perlindungan masyarakat;
- l. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan:
  - 1) Penanggulangan bencana.
  - 2) Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya.
  - 3) Penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat).

- 4) Melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat
- 5) Memantau dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan;
- n. melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
- o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan dan melakukan kegiatan pengamanan wilayah;
- p. mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- q. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

#### **4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan serta profil desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musrenbang);
- d. mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- f. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;

- g. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi Daerah di wilayah kecamatan;
- l. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- m. menyiapkan bahan dan menyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

#### **5. Seksi Kemasyarakatan**

Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Kemasyarakatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;
- c. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang kemasyarakatan;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;

- e. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan;
- f. menyusun program kerja pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembinaan kepemudaan serta olah raga termasuk pengentasan kemiskinan;
- g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyaluran bantuan social terhadap bencana alam dan bencana lainnya;
- h. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- l. mengkoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif) obat dan bahan berbahaya lainnya;
- m. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kemasyarakatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## **6. Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan di wilayah Kecamatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan;
- f. memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan administrasi kecamatan;
- g. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- h. mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- i. Menyerahkan dokumen layanan administrasi kecamatan;
- j. Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data dan informasi pelayanan administrasi kecamatan;
- k. Melaksanakan administrasi, fasilitasi dan upaya pemecahan masalah pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan administrasi kecamatan;
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan lainnya, Kecamatan Pelaihari didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana penunjang operasional kantor. Jumlah Pegawai Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari sebanyak 25 (dua puluh lima) orang terdiri dari 17 (tujuh belas) orang PNS dan 8 (delapan) orang PTT (non PNS). Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Jabatan, Esselon , Status Kepegawaian Dan Jumlah PNS/Non PNS Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari

No	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jumlah
			PNS	Non PNS	
1.	Camat	III.a	1		1
2.	Sekretaris	III.b	1		1
3.	a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV.b	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		3	5	8
	b. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	IV.b	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		2	1	3
4.	Kasi Tata Pemerintahan	IV.a	1		1



No	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jumlah
			PNS	Non PNS	
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		0		0
5.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1		1
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	IV.a	1		0
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1		1
7.	Kasi Kemasyarakatan	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1		1
8.	Kasi Pelayanan	IV.a	1		1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1	2	3
<b>JUMLAH</b>			<b>18</b>	<b>8</b>	<b>26</b>

Kondisi kepegawaian berdasarkan pangkat kondisi kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan lingkup kantor Kecamatan Pelaihari untuk golongan IV sebanyak 2 (dua) orang, Golongan III sebanyak 14 (empat belas) orang, golongan II sebanyak 2 (dua) orang dan golongan I sebanyak 0 (nol) orang. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan golongan Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari

NO	Jenis Pangkat	Golongan/Ruang	JUMLAH
1.	Pembina Utama	IV/e	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3.	Pembina utama Muda	IV/c	-
4.	Pembina Tk. I	IV/b	1
5.	Pembina	IV/a	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>
6.	Penata Tk.I	III/d	4
7.	Penata	III/c	5
8.	Penata Muda Tk.I	III/b	4
9.	Penata Muda	III/a	2
		<b>JUMLAH</b>	<b>13</b>
10.	Pengatur Tk.I	II/d	0
11.	Pengatur	II/c	2
12.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-
13.	Pengatur Muda	II/a	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>
13.	Juru Tk.I	I/d	-
14.	Juru	I/c	-
15.	Juru Muda Tk.I	I/b	-
16.	Juru Muda	I/a	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>-</b>
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>17</b>

Jenjang pendidikan pegawai kantor Kecamatan Pelaihari untuk jenjang pendidikan sekolah dasar sebanyak 0 (nol) orang, Jenjang SLTA/SMK sebanyak 3 (tiga) orang, Jenjang D3 sebanyak 4 (empat) orang, jenjang S1 sebanyak 8 (delapan) orang dan master/pasca sarjana (S2) sebanyak 2 (dua) orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah		
		PNS	Non PNS / PTT	Jumlah
1.	Sekolah Dasar	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA/SMK	3	3	6
4.	D.1	-	-	-
5.	D.2	-	-	-
6.	D.3	4	2	6
7.	D.4	-	-	-
8.	Sarjana (S-1)	8	3	12
9.	Pasca sarjana/Master (S-2)	2	-	2
-	Doktor (S-3)	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>17</b>	<b>8</b>	<b>25</b>

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Kecamatan Pelaihari didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 4. Daftar Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana Prasarana Lingkup Kantor Kecamatan Pelaihari

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
1.	Pompa air	2	2		
2.	Mini bus	2	2		
3.	Sepeda motor	5	5		
4..	Lemari besi	10	7	3	
5.	Rak besi	3	3		
6.	Filing cabinet besi	8	8		
7.	Lemari Kayu	3	3		
8.	Rak Kayu	2	2		
9.	CCTV	2	2		
10.	Papan visual / papan nama	1	1		
11.	Papan pengumuman	1	1		
12.	Meja kerja kayu	20	18	12	
13.	Meja rapat	20	20		
14.	Kursi tamu	3	3		
15.	Kursi biasa	14	14		
16.	Bangku tunggu	4	2	2	
17.	Sofa	4	4		
18.	Mesin pemotong rumput	1		1	
19.	Lemari es	2	2		

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
20.	AC split	12	9	3	
21.	Kipas angin	6	7		
22.	Televisi	1	1		
23.	Loudspeaker	2	1		
24.	Sound system	2	1		
25.	Stabilisator	1	1		
26.	Camera video	1	1		
27.	Handy cam	1	1		
28.	Karpet	4	4		
29.	Tangga	1	1		
30.	Audio mixing stationer	1	1		
31.	Audio monitor active	1	1		
32.	Audio visual	1	1		
33.	Microphone/wireless MIC	1	1		
34.	Power amplifier	3	1		
35.	Layar film/proyektor	3	2	1	
36.	Alat studio pemetaan lainnya	2	2		
37.	Genset	1	1		
38.	Uninterrupted power supply (UPS)	1	1		
39.	PC unit	7	6	2	
40.	Lap top	9	7	2	
41.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	13		3
42.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	1		

## F. ISU STRATEGIS

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

### 1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu :

- a) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- b) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip.

### 2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- b) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- c) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten;

- d) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten.

### 3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- a) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat;
- b) Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan yang tepat waktu;
- c) Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan;
- d) Belum optimalnya Realisasi Capaian APBDes;
- e) Kurang tertibnya administrasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah SKPD Kecamatan Pelaihari

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketentraman, Ketertiban dan keamanan masyarakat	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum memadai
		Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip	
2.	Pemberdayaan dan penguatan Kelompok rentan	Masih rendahnya lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	Kurang aktifnya Lembaga Kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna Posyandu) di desa
		Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa	
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk dalam APBD Kabupaten	Masih rendahnya tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan
		Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk Musrenbang Kabupaten	
3.	Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN	Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat	Belum optimalnya pelayanan perijinan dan administrasi kependudukan yang terlayani
		Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perijinan tepat waktu	
		Belum maksimalnya tingkat capaian keterisian data monografi dan profil kecamatan	Belum maksimalnya tingkat keterisian data monografi dan profil kecamatan
		Belum optimalnya Realisasi Capaian APBDes;	Belum optimalnya laporan keuangan desa yang cepat waktu dan sesuai standar pelaporan
		Kurang tertibnya administrasi Pengelolaan Keuangan Desa.	
		Jumlah personil di Kecamatan Pelaihari masih kurang	Belum terisinya semua jabatan fungsional umum sesuai standar SOTK

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kecamatan yang seharusnya jumlah ASN 35 orang, tersedia hanya 18 orang
		Kualitas SDM yang ada masih jauh dari standar ideal aparaturnya pelayanan publik	Kurangnya peluang dan kesempatan peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN
		Sarana dan prasarana kantor Kecamatan Pelaihari masih kurang memadai peralatan penunjang gedung kantor	Kurangnya Anggaran dan sarana prasarana penunjang operasional kegiatan
		Terbatasnya anggaran yang dikelola oleh Kecamatan, sedangkan kebutuhan operasional pelayanan dan kegiatan pembangunan	

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut. :

1. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
2. Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;
3. Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## G. PRODUK DAN LAYANAN

Kecamatan Pelaihari menerbitkan beberapa produk layanan yang didasari oleh:

1. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 yang dijabarkan ke Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017;
2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 180 Tahun 2015;
4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian dan Pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat dalam Wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun jenis layanan tersebut terdiri dari:

- ❖ Pelayanan Non Perizinan

1. Rekomendasi Perizinan
2. Rekomendasi Nikah
3. Pengantar Pindah Domisili
4. Pengantar KTP
5. Pengantar Kartu Keluarga
6. Legalisasi Permohonan Perizinan
7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
8. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
9. Legalisasi Surat Keterangan Ghaib
10. Legalisasi Proposal Bantuan
11. Legalisasi Surat Keterangan Berkelakuan Baik
12. Legalisasi Surat Izin Keramaian
13. Legalisasi Surat Kehilangan
14. Legalisasi Surat Keterangan Usaha
15. Legalisasi Permohonan Perizinan

❖ Pelayanan Perizinan

1. Izin Usaha Mikro dan Kecil.

## H. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

Untuk mendukung tercapainya pencapaian kinerja organisasi, Kecamatan Pelaihari didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana serta anggaran yang dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 6. Dukungan SDM, Sarana Prasarana Dan Anggaran pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	SDM	KET
1.	Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.825.000	2.825.000	100%	4 Orang	Sub Bag Perencanaan & Keuangan
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.160.000	1.100.000	94,83%	4 Orang	Sub Bag Perencanaan & Keuangan
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Administrasi Keuangan Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.764.662.647	8.937.102.114	91,52%	4 Orang	Sub Bag Perencanaan & Keuangan
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500.000	500.000	100%	4 Orang	Sub Bag Perencanaan & Keuangan
3.	Meningkatnya		Administrasi	Penyediaan			89,98%	5	Sub Bag

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	SDM	KET								
	pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian		Umum Perangkat Daerah	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.262.410	6.534.500		Orang	Umum & Kepegawaian								
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.254.824	134.211.068	88,15%	5 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian								
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.806.502	26.606.445	86,37%	5 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian								
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.451.038	9.031.000	78,87%	5 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian								
				Penyediaan Bahan/Material	9.967.440	8.905.000	89,34%	5 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian								
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	750.000	750.000	100%	5 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian								
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.000.000	233.984.443	99,57%	5 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian								
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	41.050.000	36.533.487	89%	5 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian						
						Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.077.984	195.480.876	99,70%	5 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian						
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000	29.988.500	99,36%	5 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian						
												Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	40.500.000	38.670.644	95,48%	5 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian
												Pemeliharaan			100%	5	Sub Bag

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	SDM	KET
				Peralatan dan Mesin Lainnya	6.800.000	6.800.000		Orang	Umum & Kepegawaian
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38.489.280	29.915.670	77,72%	3 Orang	Seksi PMD/K
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.965.540	7.705.000	96,73%	2 Orang	Seksi Ketentraman & Ketertiban
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Instrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.209.373.308	1.126.931.560	93,18%	2 Orang	Seksi Kemasyarakatan
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Wilayah Kecamatan	48.413.110	48.020.660	99,19%	2 Orang	Seksi Ketentraman & Ketertiban
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Daerah	4.812.440	4.575.000	95,07%	3 Orang	Seksi PMD/K
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.393.600	2.140.000	89,41%	1 Orang	Seksi Tata Pemerintahan
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19.999.680	16.635.000	83,18%	3 Orang	Seksi PMD/K



## I. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 700.1.2.8/165/LHE-AKIP/Insp/2023, tanggal 27 Juni 2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 bahwa ada 4 (empat) komponen yang di tindaklanjuti, yaitu :

Tabel 7. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
PERENCANAAN KINERJA	Agar dilakukan penyelarasan terhadap indikator yang belum selaras pada dokumen kinerja	Telah dilakukan Penyelarasan terhadap indikator yang belum selaras pada dokumen kinerja
	Agar dilakukan evaluasi secara berkala terhadap dokumen perencanaan kinerja sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan perbaikan pencapaian kinerja	Telah dilakukan evaluasi secara berkala terhadap dokumen perencanaan kinerja sebagai dasar penyempurnaan dan perbaikan kinerja
	Agar dilakukan evaluasi terhadap target indikator kinerja yang masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Telah dilakukan Evaluasi terhadap indikator kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku
PENGUKURAN KINERJA	Agar dilakukan monitoring secara berkala atas pencapaian target kinerja, dan dilakukan berjenjang pada unit kerja dibawahnya sehingga akan diketahui kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja dan dibuat sebagai dasar perbaikan kinerja.	Telah dilakukan monitoring target kinerja dan berjenjang sehingga mengetahui kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja sebagai dasar perbaikan kinerja
	Agar dilakukan pemberian reward dan punishment atas hasil pencapaian target kinerja dari perjanjian kinerja yang telah disepakati, dan bila memungkinkan disampaikan pada kegiatan khusus.	Membuat SK Penunjukan Pegawai Terbaik dan memberikan teguran secara tertulis kepada ASN yang tidak disiplin
PELAPORAN KINERJA	Untuk menjamin keandalan data kinerja, agar ditunjuk petugas yang menangani pengumpulan data kinerja.	Membuat SK Penunjukan Petugas Pengumpulan Data Kinerja
	Agar dibuat tabel dan Analisa yang memberikan informasi atas capaian target, sehingga dapat diketahui perhitungan capaian target yang sebenarnya	Membuat tabel dan analisis informasi atas capaian target untuk mengetahui perhitungan capaian target yang sebenarnya
	Agar dilakukan reviu terhadap sasaran RPJMD, yaitu pada Misi 4 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat, Indikator Cakupan kinerja program aksi keagamaan dan sosial lingkup kecamatan, apakah menjadi sasaran yang diampu	Telah dilakukan reviu terhadap Sasaran RPJMD pada Misi ke 4 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas religius dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat tidak menjadi sasaran yang diampu kecamatan
	Agar Laporan Kinerja mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yang sesungguhnya, hal ini untuk mengetahui adanya peningkatan/ penurunan atas capaian target	Membuat Laporan Kinerja mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja untuk mengetahui peningkatan/penurunan atas capaian target

KOMPONEN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
	Agar dilakukan reviu berjenjang atas laporan kinerja yang disusun, sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai	Telah dilakukan reviu berjenjang atas laporan kinerja yang disusun
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berkala yang merupakan bentuk pemantauan dan mengendalikan kinerja dan dibuat rencana aksi hal ini untuk perbaikan dan akan diketahui target-target yang belum tercapai dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja	Membuat Rencana Aksi secara berkala untuk mengetahui target-target dan kendala-kendala yang dihadapi
	Agar saran hasil evaluasi APIP segera ditindaklanjuti, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan nilai hasil evaluasi yang akan datang	Saran hasil evaluasi APIP sudah ditindaklanjuti

## J. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Dalam pembuatan Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2023 ini tim penyusun membagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Pelaihari, menggambarkan maksud dan tujuan, dasar hukum, cascading kinerja, tugas pokok fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Pelaihari.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Kecamatan Pelaihari yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan instrument pendukung capaian kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Menampilkann kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. VISI RPJMD

Rencana Strategis Kabupaten Tanah Laut dijabarkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.

RPJMD Kabupaten Tanah Laut ini telah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD untuk tahun 2018 sampai dengan 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target selama periode tersebut.

Visi adalah suatu gambaran jauh kedepan, kemana suatu organisasi/lembaga hendak dibawa. Pernyataan Visi Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2018-2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA TANAH LAUT BERKARYA, INOVASI, TERTATA, RELIGIUS, AKTUAL, DAN SINERGI (BERINTERAKSI)”**

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

**BERKARYA**

Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

**INOVASI**

Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi ini berupa terobosan

jenis pelayanan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

### TERTATA

Aspek administrasi dan aspek substansi di atur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

### RELIGIUS

Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas sebagai sarana membangun produktivitas aparatur daerah dan kehidupan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.

### AKTUAL

Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani yaitu masyarakat di daerah Kabupaten Tanah Laut.

### SINERGI

Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

*Tagline* dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah "**DESA DIBINA, KOTA DITATA**". Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah "**KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS**".

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah Tanah Laut yang *BERINTERAKSI* pada lokus "*DESA DIBINA, KOTA DITATA*" melalui "*KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS*". Fokus pada lokus "*DESA DIBINA, KOTA DITATA*" adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Kondisi yang diharapkan dari pembinaan desa dan penataan kota di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah karya nyata dalam wujud peningkatan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan di tingkat perdesaan dan perkotaan.

## B. MISI RPJMD

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan "**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**", maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA	:	Diwujudkan dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut
INOVASI	:	Diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif
TERTATA	:	Diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
RELIGIUS	:	Diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat
AKTUAL DAN SINERGI	:	Diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Rencana Strategis Kecamatan Pelaihari yaitu mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah dan mendukung, Misi ke-1 dan Misi ke-3 Kepala Daerah, dengan menetapkan Tujuan dan Sasaran Strategi Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut serta cara pencapaian tujuan dan Sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini, kemudian sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2023 yaitu bertepatan dengan tahun kelima Renstra akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahunan 2023 pada pembahasan selanjutnya.

Misi I : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya dengan indikator Cakupan Kinerja Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) .

Misi 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dengan indikator Nilai SAKIP, Nilai RB.

### C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, Kecamatan Pelaihari beserta seluruh komponen organisasi berusaha untuk mewujudkan dengan menetapkan tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023.

Adapun tujuan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan.
2. Terwujudnya implementasi tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien.

Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan berhasil guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Pelaihari adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
2. Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.
3. Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian.
4. Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD.

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Kantor Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 8. Sasaran strategis Kantor Kecamatan Pelaihari

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	80%
2.	Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	60
		Nilai SAKIP	82
		Nilai ZI	51
3.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%
4.	Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Persentase pengelolaan keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%

Pernyataan tujuan Kecamatan Pelaihari diatas mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan Kecamatan Pelaihari handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Melalui tujuan tersebut diharapkan Kecamatan Pelaihari menjadi motor penggerak bagi SKPD-SKPD lainnya dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam mewujudkan apa yang menjadi visi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Setelah ditetapkan Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan adalah disusunnya program dan kegiatan sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi. Program dan kegiatan yang disusun tentulah harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Pelaihari, dalam rangka menjawab tantangan/permasalahan dan isu-isu strategis sebagaimana telah dirumuskan. Visi Kepala Daerah sebagaimana tersebut diatas agar bisa diwujudkan harus dituangkan dan dirinci ke dalam misi Kepala Daerah yang ditetapkan untuk Kecamatan Pelaihari harus menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai gambaran aktivitas yang akan dilaksanakan. Untuk menggambarkan Visi, Misi, Kepala Daerah dan Tujuan, Sasaran Strategis dan indikator-indikator beserta target-targetnya pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sesuai Renstra Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Pelaihari

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/IKU	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					Ket
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Terwujudnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat	Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	70%	72%	75%	80%	80%	
2	Terwujudnya Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik	Indek RB	60	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	45 (C)	46 (CC)	50 (CC)	60 (CC)	60 (CC)	
					Nilai SAKIP	72 (BB)	75 (BB)	80 (A)	82 (A)	83 (A)	
					Nilai Zona Integritas	49	49	50	51	52	
3	Terwujudnya tata kelola	Presentase pengelolaan	100%	Meningkatnya pengelolaan	Persentase pengelolaan	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/IKU	TARGET INDIKATOR KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					Ket
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	admistrasi yang tertib, efektif dan efisien	administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan keuangan yang tertib		administrasi umum dan kepegawaian	admistrasi umum dan kepegawaian yang tertib sesuai SOP						
				Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Persentase pengelolaan perencanaan pelaporan keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	

Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja, baik untuk pengelolaan maupun pengendalian kegiatan. Sehingga pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan lebih terarah dan terukur, jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Berdasarkan Formulir Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Kecamatan Pelaihari menentukan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama dalam mengukur keberhasilan kinerja kecamatan yaitu, Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang ada di Kecamatan.

Tingkat kepuasan masyarakat diukur berdasarkan hasil / tingkat penilaian kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan di Kecamatan Pelaihari dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 10. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	Hasil survey (80)	Semua kasi di kecamatan

Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategi Kecamatan Pelaihari Nomor 1 Terwujudnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meliputi pengukuran terhadap tingkat kepuasan terhadap pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat dengan penanggung jawab Seksi Pelayanan, Seksi PMD/K, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Kemasyarakatan. Sedangkan Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran untuk Nomor 2 Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif, efisien yaitu persentase pengelolaan administrasi perkantoran dan



kepegawaian, perencanaan keuangan yang tertib dengan penanggung jawab yaitu Subbag Umum dan Kepegawaian serta Subbag Perencanaan dan Keuangan.

#### D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja mengandung arti bahwa instansi pemerintah harus merencanakan apa yang akan dilaksanakan (program, kegiatan) dan apa hasilnya (*outcome, output*). Perencanaan kinerja sesungguhnya tidak saja merencanakan apa yang akan dikerjakan, akan tetapi sekaligus menetapkan target (*quantitative objective*) hasil yang ingin dicapai.

Oleh karena itu, perencanaan kinerja yang baik akan sangat tergantung dari pengumpulan data pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya/kekuatan yang ada dan ketepatan penentuan asumsi-asumsi ataupun prognosis/proyeksi ke depan.

Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 yang telah disepakati baik oleh Camat, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, baik Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2023.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Camat :</b>				
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	80%	5 program/ 9 kegiatan / 23 sub Kegiatan	Rp. 11.862.514.803,-
<b>Sekcam :</b>				
Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB Nilai SAKIP Nilai Zona Integritas	60 83 52	1 Program / 5 Kegiatan / 16 sub kegiatan	Rp. 10.531.067.845,-
Meningkatnya pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib sesuai SOP	100%		
Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Persentase pengelolaan perencanaan pelaporan keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%		
<b>Kasubbag Umpeg :</b>				
Memberikan Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan	17 orang	1 program / 3 kegiatan / 12 sub kegiatan	Rp. 761.920.198,-

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	baik			
Pemenuhan sarana dan prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	223 Unit		
Memberikan Pelayanan administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	15 dokumen		
<b>Kasubbag Perencanaan dan Keuangan :</b>				
Menyusun dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	7 dokumen	1 program / 1 kegiatan / 4 sub kegiatan	Rp. 9.769.147.647,-
Menyusun laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	7 dokumen		
<b>Kasi Tata Pemerintahan :</b>				
Memfasilitasi Pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan BPD	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	15 Desa		
Memfasilitasi penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Pemilihan Kepala Desa serta penjaringan aparat desa dan BPD	Jumlah desa yang difasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada dan Pemilihan Kepala Desa serta penjaringan aparat desa dan BPD	15 Desa	1 program / 1 kegiatan / 1 Sub Kegiatan	Rp. 2.393.600,-
Monitoring Penyusunan Laporan kependudukan	Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat	15 Desa		
<b>Kasi PMD/K :</b>				
Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam pemasaran hasil produksi	Jumlah kelompok masyarakat yang bisa memasarkan hasil produksinya	5 kelompok		
Memberikan pembinaan tentang penyusunan monografi kecamatan serta profil desa yang akurat	Jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik	15 Desa	2 Program / 2 Kegiatan / 3 Sub Kegiatan	Rp. 63.301.400,-
Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang mengelola keuangan dengan baik	15 Desa		
Fasilitasi kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	2 Kali		
<b>Kasi Kemasyarakatan :</b>				
Memberikan pembinaan kepada kelompok organisasi masyarakat di bidang Kemasyarakatan	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan	15 kelompok		
Memfasilitasi kegiatan di bidang sosial, keagamaan, dan olahraga di tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP	15 kegiatan	1 program / 1 kegiatan / 1 sub kegiatan	Rp. 1.209.373.308,-
Memfasilitasi penyaluran bantuan sosial di kecamatan	Jumlah masyarakat tidak mampu yang telah di fasilitasi penyaluran bantuan social	1000 orang		
<b>Kasi Trantib :</b>				
Memfasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di fasilitasi	2 kejadian	2 program / 2 kegiatan / 2 sub kegiatan	Rp. 56.378.650,-

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
Membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban	Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif	10 kelompok		
Monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	2 kejadian		
Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	Jumlah sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dimonitoring	1 kegiatan		
Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	2 kali		
<b>Kasi Pelayanan :</b>				
Memberikan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) sesuai SOP	15 pelayanan		
Memfasilitasi penanganan aduan masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang di fasilitasi	5 pengaduan	0 program / 0 kegiatan / 0 sub kegiatan	Rp. 0,-
Menyusun Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah data informasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	4 dokumen		

Kinerja yang akan dicapai untuk satu tahun anggaran 2023 yang telah tergambar dalam DPA-SKPD Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023 itulah yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Pelaihari Tahun 2023.

## E. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pelaihari pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mencapai sasaran strategis dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian/Penetapan kinerja Tahun 2023, melaksanakan 5 Program, 9 Kegiatan, dan 23 Sub Kegiatan dengan Total Anggaran dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp).
1.	Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 2.825.000
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.160.000
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 9.764.662.647
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 500.000
3.	Meningkatnya pengelolaan		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi	Rp 7.262.410

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp).
	administrasi umum dan kepegawaian			Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 152.254.824
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 30.806.502
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 11.451.038
				Penyediaan Bahan/Material	Rp 9.967.400
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 750.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 235.000.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Rp 41.050.000
				Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 196.077.984
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 30.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Rp 40.500.000				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 6.800.000				
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 38.489.280
		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 7.965.540
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Instrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp 1.209.373.308
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Wilayah Kecamatan	Rp 48.413.110

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp).
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Daerah	Rp 4.812.440
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp 2.393.600
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp 19.999.680

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2023 ini merupakan laporan kinerja kelima RPJMD 2018-2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

#### **A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI**

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999).

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Pemerintah Kabupaten Tanah laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi enam kategori sebagai berikut :

Tabel 13. Pengelompokan Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat Memuaskan
II.	Diatas 80 % sampai dengan 90 %	Memuaskan
III.	Diatas 70 % sampai dengan 80 %	Sangat baik
IV.	Diatas 60 % sampai dengan 70 %	Baik
V.	Diatas 50 % sampai dengan 60 %	Cukup
VI.	Kurang dari 50 %	Kurang

Adapun capaian kinerja Sasaran strategis Kantor Pelaihari 2023 terhadap target sebagai berikut :

Tabel 14. Realisasi Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun 2023			
			Target	Realisasi	%	Kategori
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	80%	88,04	110,05	Sangat Memuaskan

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan. Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 150 lembar kuisioner yang dibagikan, terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosuder Pelayanan;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan ;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi / Kemampuan Pelaksanaan Pelayanan;
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan ; dan
9. Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di dapat nilai untuk IKM Tahun 2023 adalah dari target 80%, dengan nilai capaian sebesar 88,04%, berdasarkan Tabel 11. tentang Pengelompokan Capaian Kinerja, IKM Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 termasuk kategori **Baik**.

Nilai capaian IKU tahun 2023 bila dibandingkan dengan capaian IKU Tahun 2022 memang mengalami peningkatan sebesar 1,03 %, dan dari sudut realisasi IKM juga meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 realisasi IKM sebesar 3,480 (Mutu Pelayanan B) dari target 80, sementara pada Tahun 2023 realisasi IKM sebesar 3,522 (Mutu Pelayanan B) dari target 80, ada peningkatan realisasi IKM sebesar 0,042.

Adapun nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yakni :

Tabel 15. Nilai Rata-Rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan Kecamatan Pelaihari Tahun 2023

No	Unsur Pelayanan	NRR	IKM
1.	Persyaratan	3,440	9,55
2.	Prosedur	3,400	9,42
3.	Waktu Pelayanan	3,360	9,32
4.	Biaya / Tarif	3,987	11,0,7
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,387	9,4
6.	Kompetensi Pelayanan	3,380	9,37
7.	Perilaku Pelayanan	3,400	9,42
8.	Maklumat Pelayanan	3,393	9,42
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,980	11,05

Dari Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-rata (NRR) tertinggi adalah unsur Biaya/tarif (3,987) sedangkan unsur yang Nilai Rata-rata (NRR) terendah adalah unsur waktu pelayanan (3,360). Angka ini



menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari kejelasan biaya/tarif sesuai ketentuan, sedangkan untuk Nilai Rata-rata semua unsur sebesar 3,522 hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan Kecamatan Pelaihari pada umumnya baik (mutu pelayanan) dan sudah merasa puas, akan tetapi unsur-unsur dengan NRR paling rendah perlu dilakukan perbaikan dalam hal ini unsur persyaratan.

Pada Tahun 2023 Kecamatan Pelaihari menetapkan target nilai IKM sebesar 80% sementara berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2023 diperoleh realisasi nilai IKM 88,40 (Mutu Pelayanan Baik) terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan terdapat nilai IKM sebesar 8,40 dari target yang ditetapkan.

Kendala permasalahan yang dihadapi Kecamatan Pelaihari dalam mencapai target IKM adalah ada unsur pelayanan yang masih memperoleh NRR rendah sebagai berikut :

1. Unsur penanganan pengaduan, saran dan masukan dari masyarakat.
2. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan prima bagi masyarakat.

Adapun upaya/solusi tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan sistem dan prosedur (SOP) dalam hal pengaduan, saran dan masukan dengan membuat banner/spanduk yang berisi tata cara alur dan mekanisme pengurusan perizinan/surat keterangan di Kecamatan Pelaihari.
2. Berkoordinasi dengan SKPD terkait (Diskominfo) untuk pembuatan sistem aplikasi pelayanan dan perizinan di Kecamatan Pelaihari.
3. Membuka kanal pengaduan, saran, dan masukan melalui media sosial yang sedang populer dikalangan masyarakat usia produktif.

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan kotak pengaduan, saran dan masukan dari masyarakat untuk bahan evaluasi dan monitoring bagi perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan membangun sistem aplikasi pelayanan dan perizinan di Kecamatan Pelaihari.
3. Mengaktifkan lagi akun Sosial Media Kecamatan Pelaihari dalam rangka keterbukaan informasi kepada masyarakat maupun sebagai laporan kegiatan

yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pelaihari sehingga kinerja Kecamatan Pelaihari dapat diketahui oleh masyarakat.

Selain itu diharapkan kerjasama dengan para stake holder terkait untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar pelayanan di Kecamatan Pelaihari sesuai dengan harapan masyarakat.

### **1. Sasaran RPJMD**

Pada Tahun 2023 (Tahun Ke-5) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023, Kecamatan Pelaihari menetapkan 3 (tiga) tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pertama Terwujudnya kualitas pelayanan publik di kecamatan dan Tujuan kedua Terwujudnya Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik serta Tujuan Ketiga Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien. Sasaran strategis Kecamatan Pelaihari yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian serta Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan.

Aktual bagi ketentuan yang telah disepakati pihak terkait dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur Pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan memadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya dituangkan dalam bentuk kebijakan, dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Pelaihari adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan.
2. Kebijakan mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, professional dan daya saing.

Kebijakan mengembangkan perekonomian desa yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi di pedesaan.

Adapun tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan sesuai dengan Visi "Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi, (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)" dan Misi "Berkarya meningkatkan kualitas sumber

daya dan pelayanan masyarakat berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya” dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 16. Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kecamatan Pelaihari

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi, Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi			
MISI : Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan masyarakat berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan koordinasi dengan SKPD Terkait.</li> <li>2. Memperkuat pemahaman aparat akan tugas pokok dan fungsi.</li> <li>3. Memberdayakan aparat Kecamatan Desa/ Kelurahan.</li> <li>4. Menyederhanakan dan mempercepat sistem pelayanan kepada masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi yang intensif</li> <li>2. Mengikutsertakan aparatur dalam diklat-diklat.</li> <li>3. Memberikan pemahaman kepada aparat Desa mengenai tupoksinya baik melalui arahan ataupun diklat formal / non formal.</li> <li>4. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat dalam meningkatkan pelayanan yang baik.</li> </ol>
Terwujudnya Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan pemahaman ASN terhadap Sistem Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi	Menerapkan budaya kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku
Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	1. Meningkatkan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	Meningkatkan program dan kegiatan tata kelola administrasi perkantoran.	Melaksanakan program dan kegiatan tata kelola administrasi perkantoran.
	2. Meningkatkan tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Meningkatkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan pelaporan keuangan	Memberikan arahan untuk selalu dapat melakukan pengumpulan laporan tepat waktu, akurat dan tertib

## 2. Eselon III (Camat)

Adapun Realisasi target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 mencapai 88,40 % dari target sebesar 80 % dengan persentase capaian 110,05%. Lebih Jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 17. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pelaihari Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada dikecamatan	80%	88,40%	110,05

Adapun realisasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan Pelaihari dari tahun 2018-2023 terjadi peningkatan

seiring bertambahnya sarana prasarana menunjang kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama KecamatanPelaihari Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	90	73,19	81,32	70	81,81	116,87	72	81,9	113,75	75	81,92	109,20	80	87,01	108,76	80	88,04	110,05

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diperoleh penjelasan sebagai berikut :

### 1) Perbandingan Realisasi dengan Target:

Pencapaian realisasi dari target Tahun 2023 sebesar 88,40% dan dibandingkan dengan target realisasi 2023 maka pencapaian target 2023 mencapai 110,05%. Selain terjadi peningkatan realisasi nilai IKM dari 2022 ke 2023, persentase capaian juga meningkat. Peningkatan ini tercapai karena adanya hubungan dan koordinasi yang cukup baik antara dinas/instansi terkait dengan Kecamatan Pelaihari. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang cukup besar mempengaruhi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

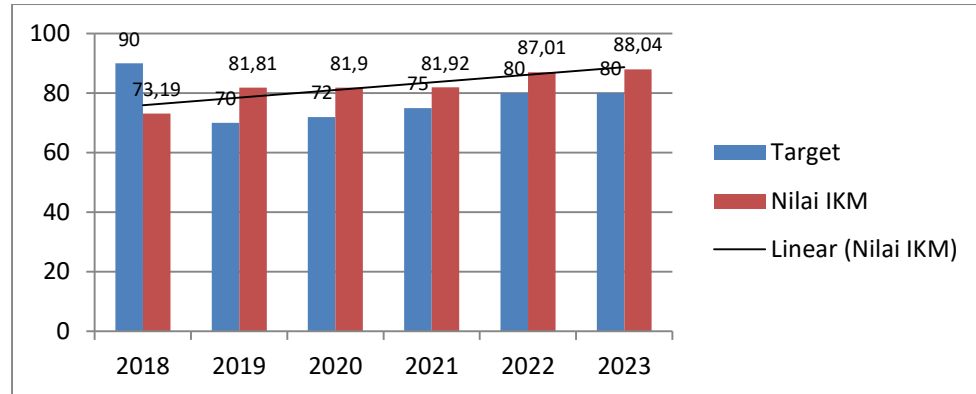
### 2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

- a) Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 terjadi peningkatan yaitu 87,01 % menjadi 88,04 %.
- b) Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 sebesar 110,05% dibandingkan tahun 2022 sebesar 108,76 % terjadi kenaikan 1,29%.
- c) Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Pelaihari tahun 2023 sebesar 80, maka realisasi 2023 sudah mencapai 8,04 dari target;

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Sasaran Strategis Kecamatan Pelaihari dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 terdapat peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan Renstra Kecamatan Pelaihari 2018-2023 dalam wujud Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan Indikator tingkat kepuasan

masyarakat (IKM) terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan Tahun 2023 telah dilaksanakan dengan nilai 80.

Untuk lebih jelasnya realisasi dan target IKM Tahun 2018-2023 Kantor Kecamatan Pelaihari dapat di lihat dari grafik tersebut dibawah ini :



Grafik 1. Realisasi dan Target IKM Tahun 2018-2023

### 3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pelayanan terhadap masyarakat/publik terkait pelayanan umum tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 terjadi kenaikan penilaian. Kenaikan penilaian terutama pada unsur produk spesifikasi jenis pelayanan dan sarana prasarana pelayanan. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengurusan pelayanan pada Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Pelaihari sesuai dengan kewenangan telah terlayani sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.

Terjadinya peningkatan nilai IKM tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 di tunjang dari kesiapan pelayanan publik di kantor Kecamatan Pelaihari. Baik dari kesiapan sumberdaya manusia, sarana prasarana penunjang dan jaringan internet setiap tahunnya mengalami peningkatan. Walaupun demikian sangat diharapkan kinerja pelayanan harus mengalami peningkatan setiap tahunnya demi mencapai pelayanan prima.

Ketentuan biaya tarif layanan dihapuskan / gratis pada beberapa pelayanan seperti pengolahan KTP, KK, Akte kelahiran, Kartu Identitas Anak dan lain-lain menyebabkan salah satu unsur yang paling tinggi tingkat kepuasan masyarakat di tahun 2023.

Nilai terendah ada pada unsur penanganan pengaduan saran dan masukan jenis layanan dari tahun 2021-2023 dikarenakan tidak ada pengaduan permasalahan pelayanan dari masyarakat yang mengurus

layanan perizinan dan layanan non perizinan karena dianggap bahwa aparaturnya Kecamatan Pelaihari telah melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditentukan sehingga masyarakat yang melakukan pengurusan izin merasa dipermudah dan waktu yang cepat sampai izin selesai dikerjakan oleh aparaturnya Kecamatan Pelaihari.

#### 4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai sasaran meningkatnya Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan, Kantor Kecamatan Pelaihari di dukung oleh Program/kegiatan penunjang dengan pagu Rp. 11.682.514.802,- (Sebelas milyar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus dua rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 10.904.945.967,- (Sepuluh Milyar sembilan ratus empat juta sembilan ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) atau 91,93 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 19. Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.531.067.845,-	Rp. 9.669.023.077,-
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp . 38.489.280,-	Rp. 29.915.670,-
3	Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 7.965.540,-	Rp. 7.705.000,-
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 1.257.786.418,-	Rp. 1.174.952.220,-
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 27.205.720,-	Rp. 23.350.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 11.682.514.802,-</b>	<b>Rp. 10.904.945.967,-</b>

Dalam rangka mendukung indikator sasaran Eselon III (Camat) sekaligus Perjanjian Kinerja Camat Pelaihari yang juga merupakan IKU Kecamatan Pelaihari yang dilaksanakan oleh seluruh Kasubbag dan Kasi lingkup Kecamatan Pelaihari dapat dijelaskan dibawah ini.

Pada Tahun 2018 Kecamatan Pelaihari telah dilaksanakan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dengan nilai B yang berarti secara umum

implementasi SAKIP Baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, tetapi perlu sedikit perbaikan.

Pada Tahun 2019 Kecamatan Pelaihari telah dilaksanakan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dengan nilai BB yang berarti sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Pada Tahun 2023 Kecamatan Pelaihari masih dalam proses hasil Evaluasi SAKIP oleh Tim dari Menpan RB dan reuiu oleh APIP Inspektorat Kab. Tanah Laut.

- Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

Nilai Sakip dengan target 83 dengan realisasi 76,4 (B) dengan presentase 92,04 % untuk mencapai target menggunakan anggaran Rp. 2.825.000,- (Dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah dan kendala yang dihadapi yaitu kurang berperannya para Kasi dalam mendokumentasikan setiap kegiatan.

- Adapun solusi untuk memecahkan kendala yang dikemukakan diatas yaitu :

- a. Para kasi dan kasubbag lingkup Kecamatan Pelaihari diarahkan untuk melaksanakan kegiatan dengan membuat laporan kegiatan, melengkapi foto dan video kegiatan serta menyimpan dalam 1 (satu) folder tersendiri di PC atau laptop.
- b. Mengintensifkan kegiatan rapat staf dalam rangka pemberian arahan kegiatan sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

- Adapun rencana aksi untuk meningkatkan nilai sakip yaitu :

- a. Mengefektifkan penggunaan media sosial resmi kecamatan dalam rangka transparansi publik, menambah platform media sosial berupa instagram, mengupdate kembali konten berita kegiatan pada website kecamatan.

### **3. Eselon III (Sekretaris)**

Adapun Realisasi target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 untuk persentase

pengelolaan umum dan kepegawaian yang tertib dapat terealisasi penuh 100%. Lebih Jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20. Sasaran Strategis, Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Sekretariat Kecamatan Pelaihari

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	60	0	0,00%
		Nilai SAKIP	83	76,4	92,05%
		Nilai Zona Integritas (ZI)	52	19,94	38,35%
2.	Meningkatkan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Persentase pengelolaan perencanaan pelaporan Keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>					<b>82,60%</b>

Adapun realisasi capaian target terhadap peningkatan implementasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja (Nilai SAKIP dan Nilai ZI) dan peningkatan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian (Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib) yang ada di Kecamatan Pelaihari dari tahun 2020-2023 terjadi peningkatan seiring bertambahnya sarana prasarana menunjang kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 19 berikut:

Tabel 21. Realisasi, Target, Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja Sekretariat Kecamatan Pelaihari

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
						Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai RB	-	17,21	19,8	62,67	60	0	0
2.	Nilai SAKIP	-	56,54	62,56	76,3	83	76,4	92 %
3.	Nilai ZI	-	35,35	35,35	63,92	52	19,94	38 %
4.	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%
5.	Persentase pengelolaan perencanaan pelaporan Keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diperoleh penjelasan sebagai berikut:



### 1) Perbandingan realisasi dengan target;

Realisasi nilai RB tahun 2022 sebesar 62,67 (B) sedangkan untuk tahun 2023 tidak dilakukan evaluasi RB pada tingkat SKPD. Nilai SAKIP tahun 2022 sebesar 76,3 (BB) sedangkan Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 76,4 (BB).

Kemudian target nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 80 dengan realisasi sebesar 76,4 atau dengan kata lain realisasi mencapai 95,5 %, dengan nilai komponen perencanaan kinerja 23,1 point pengukuran kinerja 22,5 point pelaporan kinerja 11,54 dan point evaluasi internal 19,25 point. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 22. Realisasi Nilai SAKIP Kecamatan Pelaihari Tahun 2022 berdasarkan Komponen penilaian

No	Komponen Penilaian	Nilai					Keterangan
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Perencanaan Kinerja	24,41	20,87	20,87	24,00	23,10	
2.	Pengukuran kinerja	16,25	12,82	13,75	23,01	22,50	
3.	Pelaporan kinerja	11,41	9,97	9,97	10,99	11,55	
4.	Evaluasi internal	6,92	0	5,11	18,52	19,25	
5.	Pencapaian kinerja	17,08	0	12,88	0	0	
<b>Jumlah</b>		<b>76,08</b>	<b>56,54</b>	<b>62,56</b>	<b>76,30</b>	<b>76,40</b>	

Sumber data : Rekap hasil evaluasi SAKIP Kab. Tanah Laut Tahun 2019-2023

Nilai Sakip Kecamatan Pelaihari pada tahun 2023 sedikit kenaikan dari tahun 2022. Komponen Penilaian yang mendapat nilai tertinggi adalah Perencanaan Kinerja dengan nilai 23,10

Indikator kinerja Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib di lingkungan Kecamatan Pelaihari dapat terpenuhi seluruh target (100%) baik dalam hal keperluan kepegawaian dan administrasi umum.

### 2) Perbandingan realisasi dengan realisasi terkait;

- a) Realisasi Target nilai SAKIP tahun 2022 dengan tahun 2023 untuk Indikator kinerja Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib sama 100%, Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 76,40 sedangkan tahun 2022 sebesar 76,30 .
- b) Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis tahun 2023 optimis dapat tercapai dengan melihat hasil realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Tabel 23. Realisasi Capaian SAKIP Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 Dan Persentase Capaian Kinerja Terhadap Target SAKIP Tahun 2023.

No.	Jenis Data	Satuan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2023		Kinerja Tahun 2023(%)		
				Target	Realisasi	Terhadap Capaian Tahun 2022	Terhadap Target Tahun 2023	Terhadap Target Tahun 2024
1.	RB	Nilai	62,67	60	0	0	0	
	SAKIP	Nilai	76,30	83	76,40		92,05	
	ZI	Nilai	63,92	52	19,94		38,35	
2.	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	%	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase pengelolaan perencanaan pelaporan Keuangan yang tertib dan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100

### 3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Realisasi dan capaian kinerja di sekretariat setiap tahunnya meningkat dapat dilihat dari realisasi program kegiatan penunjang dan nilai SAKIP kecamatan Pelaihari. Hal ini ditunjang Sumberdaya Manusia yang ada dan sarana penunjang yang cukup lengkap dan terfasilitasi dengan baik sehingga realisasi capaian kinerja meningkat

### 4) Analisa Penggunaan Sumber Daya

Dalam menjalankan kegiatan pada bagian Sekretariat Kecamatan Pelaihari dibantu oleh 9 (Sembilan) orang ASN dan PTT, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 24. Sumber Daya Manusia pada Bagian Sekretariat

NO	JABATAN	ASN	PTT
1	Sekretaris	1	
2	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	
4	Bendahara	1	
5	Verifikator	1	
6	Analisis Tata Laksana		
7	Pengadministrasi Umum	1	
8	Pengelola Sarana dan Prasarana	1	
9	Petugas Operator Keuangan		1
10	Petugas Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian		2
Jumlah		7	3

### 5) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai, Kantor Kecamatan Pelaihari di dukung oleh Program/kegiatan penunjang dengan pagu

10.531.067.845-. (Sepuluh milyar lima ratus tiga puluh satu juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 9.669.023.077- (Sembilan milyar enam ratus enam puluh Sembilan juta dua puluh tiga ribu tujuh puluh tujuh rupiah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 25. Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 10.531.067.845,-	Rp. 9.669.023.077,-

- Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:
  - a. Kurangnya tenaga ASN yang menangani kearsipan dokumen dengan kualifikasi golongan II jabatan fungsional arsiparis.
  - b. Kurangnya kendaraan dinas operasional yang menunjang kegiatan dalam pembinaan, pemberdayaan kelurahan dan desa untuk sosialisasi dan edukasi sesuai tupoksi seksi masing-masing.
  - c. Kurangnya mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis bagi staf untuk penyusunan Laporan Perencanaan SKPD, Laporan Keuangan SKPD (Bulanan, Triwulanan, Semester, Tahunan), serta Laporan Kinerja SKPD.
- Adapun solusi untuk memecahkan kendala yang dikemukakan diatas yaitu :
  - a. Melakukan usulan kebutuhan ASN yang menangani masalah kearsipan lingkup kecamatan Pelaihari sehingga tata kelola kearsipan menjadi efektif dan tepat sasaran.
  - b. Melakukan usulan pelatihan dan bimbingan teknis bagi staf ASN Kecamatan Pelaihari dalam rangka penyusunan Laporan Perencanaan SKPD, Laporan Keuangan SKPD, Laporan Kinerja SKPD sehingga tahapan penyusunan perencanaan daerah, penyusunan anggaran daerah dan penatusahaan keuangan, penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan.

- c. Melakukan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) untuk kendaraan operasional Tahun 2023 Kecamatan Pelaihari.
- Adapun rencana aksi untuk meningkatkan nilai saki yaitu :
- Pendekatan dan pengawalan terhadap usulan yang diajukan melalui SKPD yang membidangi kepegawaian, perencanaan anggaran dengan Tim anggaran Pemerintah Daerah serta Badan Anggaran DPRD.

#### 4. Eselon IV (Kepala Sub Bagian/Seksi)

Kecamatan Pelaihari sudah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), dengan di dukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh sub bagian/seksi-seksi yang ada pada lingkup Kecamatan Pelaihari. Ada 5 (lima) Program dan 9 (sembilan) kegiatan yang mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis pertama Kecamatan Pelaihari. Adapun Target, realisasi dan capaian Kinerja kepala subbagian dan Kepala Seksi lingkup kecamatan Pelaihari sebagai berikut:

##### 1) Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Tabel 26. Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Tata Pemerintahan TA. 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
1. Memfasilitasi pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan BPD	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	15 desa	15 desa	15 Desa	100 %
2. Memfasilitasi Penyelenggaraan pemilu, Pilkada dan Pemilihan Kepala Desa serta penjarangan aparat Desa dan BPD	Jumlah desa yang difasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan pemilu, pilkada dan pemilihan kepala desa serta penjarangan aparat desa dan BPD	15 desa	15 desa	5 desa	33,33 %
3. Memonitoring penyusunan laporan kependudukan	Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat	15 desa	15 desa	15 desa	100 %

Realisasi capaian kinerja Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan Pelaihari terhadap target mencapai 100 %. Terasfasilitasinya semua Pemerintahan desa baik dalam mengelola administrasi pemerintahan desa dan BPD melalui Penyelenggaraan pemilihan kepala Desa yang

serentak dilaksanakan pada tanggal 13 September 2023 untuk Kecamatan Pelaihari ada 5 (lima) Desa yang melaksanakan Pilkades yaitu Desa Bumi Jaya, Desa Sumber Mulia, Desa Kampung Baru, Desa Panjaratan dan Desa Tunggaran.



Gambar 2. Pelaksanaan Aksi Damai Pemilihan Kepala Desa

Pembinaan terkait tugas pokok dan fungsi Kasi Pemerintahan dalam melaksanakan penyusunan laporan kependudukan melalui aplikasi Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel) sehingga desa yang menyusun laporan tersebut data kependudukannya terverifikasi secara akurat.

.Sedangkan Pembinaan dan monitoring penyusunan laporan kependudukan juga terlaksana pada 15 (lima belas) desa dan 5 Kelurahan melalui kegiatan monitoring dan pengawasan terhadap masyarakat se Kecamatan Pelaihari yang terdiri dari 15 Desa dan 5 Kelurahan terkait perubahan data kependudukan, pindah domisili dan pembuatan akte kependudukan. Hal ini dilakukan dalam rangka pemutakhiran data penduduk laki-laki dan data penduduk perempuan serta jumlah kelahiran penduduk serta jumlah kematian penduduk untuk data bantuan sosial, data pemilih pada pemilu sehingga mencakup data yang terbaru.

**a. Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Tata Pemerintahan**

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 1 (satu) orang Kasi Tapem (Pejabat Pengawas). Kegiatan yang dilaksanakan pada Kasi Tapem yaitu memfasilitasi pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan BPD, Memfasilitasi Penyelenggaraan pemilu, Pilkada dan Pemilihan Kepala Desa serta penjaringan

apparat Desa dan BPD dan Memonitoring penyusunan laporan kependudukan

b. **Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada Seksi Tata Pemerintahan**

Dalam menjalankan Kegiatan Seksi Tata Pemerintahan ditunjang dengan 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran Rp. 2.393.600,- (Dua juta tiga ratus Sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah) terealisasi Rp. 2.140.000,- (Dua juta seratus empat puluh ribu rupiah) atau 89,41%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 27. Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Persentase Capaian (%)
1.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Rp. 2.393.600,-	Rp. 2.140.000,-	89,41 %
a.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 2.393.600,-	Rp. 2.140.000,-	89, 41 %
-	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp. 2.393.600,-	Rp. 2.140.000,-	89,41 %

c. **Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Tata Pemerintahan**

Belum optimalnya administrasi pemerintahan desa terutama dalam penjaringan dan penyaringan calon anggota perangkat desa dan calon anggota administrasi BPD

d. **Solusi kendala/Permasalahan yang dihadapi Seksi Tata Pemerintahan**

Adapun upaya tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Anggota tim penjaringan dan penyaringan akan diberikan arahan oleh Camat Pelaihari
2. Anggota tim penjaringan dan penjaringan lebih memahami lagi Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 41 Tahun 2021 tentang Tata cara pengangkatan dan pemberhentian staf administrasi BPD dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 116 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut

Nomor 35 Tahun 2020 tentang kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Calon perangkat Desa.

e. **Rencana aksi yang akan dilakukan Seksi Tata Pemerintahan**

1. Melaksanakan rapat koordinasi tentang pelaksanaan administrasi pemerintahan desa 1 kali dalam setahun.
2. Lebih sering lagi untuk melakukan monitoring / evaluasi ke Desa minimal 4 triwulan.

2) **Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan**

Realisasi capaian kinerja Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan kecamatan Pelaihari terhadap target mencapai 100% realisasi fasilitasi kelompok masyarakat dalam pemasaran hasil produksi terealisasi 5 kelompok (100 %). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 28. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa TA. 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
1. Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam pemasaran hasil produksi	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	100%
2. Memberikan pembinaan tentang penyuluhan monografi kecamatan serta profil desa yang akurat	Jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik	15 desa	15 desa	15 desa	100 %
3. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang mengelola keuangan dengan baik	15 desa	15 desa	15. desa	100 %
4. Fasilitasi kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %

Pelaksanaan fasilitasi pemasaran hasil produksi dilaksanakan pada Pameran Pembangunan pada hari Jadi Kabupaten Tanah Laut ke-58 serta dengan mengangkat BUMDes yang ada di Kecamatan yang bergerak dalam usaha pembuatan telur asin, peternakan lebah madu, krupuk, sewa tenda, asinan buah tetap berjalan sampai dengan sekarang.

Salah satu kelompok dari Desa Bumi Jaya yaitu Kelompok "Rumus" dengan bidang usaha catering makanan, sewa tenda dan lain-lain sampai dengan sekarang.

Promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen. Penjualan langsung merupakan hasil dari promosi langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Pembinaan tentang Penyusunan Monografi Kecamatan serta Profil Desa dilaksanakan pada 15 (lima belas) desa. Kegiatan monografi kecamatan dan profil desa di bawah koordinasi Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut. Pelaksanaan kegiatan penyusunan monografi kecamatan dan profil desa berjalan dengan baik.

Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2023, yaitu kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Untuk pelaksanaan kegiatan ini sudah dilaksanakan Evaluasi APBDesa untuk 15 (lima belas) desa yang ada di Kecamatan Pelaihari dengan Persentase capaian kegiatan sebesar 100 % .



Gambar 3. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Pelaihari

Pelaksanaan Musrenbang desa dilakukan oleh 15 desa yang ada dilingkup kecamatan Pelaihari dan dilanjutkan dengan Pra Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan menghadirkan utusan desa, Pendamping Desa dan kecamatan serta instansi terkait.



Gambar 4. Pelaksanaan Musrenbang Desa di Kecamatan Pelaihari



Kegiatan selanjutnya pada Seksi PMD/K pada Kecamatan Pelaihari juga melaksanakan Evaluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan pada 15 Desa se Kecamatan Pelaihari yang difasilitasi oleh Tim Evaluasi APBDesa dan APBDesa Perubahan Kecamatan Pelaihari, hal ini sebagai perwujudan pengawasan penatausahaan keuangan desa baik Dana Desa dari Dana Kemendesa dan PDT maupun Alokasi Dana Desa (ADD) yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Tanah Laut.



Gambar 5. Pelaksanaan Evaluasi APBDes di Kecamatan Pelaihari

**a. Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi PMD/K**

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi Kemasyarakatan di Kec. Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 3 (tiga) orang yaitu 1 orang Plt. Kasi PMD/K (Pejabat Pengawas) dan 2 orang staf ASN dengan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan untuk memfasilitasi kegiatan yang sesuai dengan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi PMD/K yaitu melakukan kegiatan Fasilitasi Musyawarah Desa (Musdes), Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan), Pelaksanaan Evaluasi APBDes, Evaluasi APBDes perubahan, melakukan fasilitasi kelompok masyarakat dalam memasarkan produknya.

**b. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada Seksi PMD/K**

Dalam menjalankan Kegiatan Seksi PMD/K di tunjang dengan 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan

total anggaran Rp. 63.301.400,- (Enam puluh tiga juta tiga ratus satu ribu empat ratus rupiah) terealisasi Rp. 51.125.670,- (Lima puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 29. Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Persentase Capaian (%)
1.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	Rp. 24.812.120,-	Rp. 21.210.000,-	85,48 %
a.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 24.812.120,-	Rp. 21.210.000,-	85,48 %
-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp. 4.812.440,-	Rp. 4.575.000,-	95,07 %
-	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp. 19.999.680,-	Rp. 16.635.000,-	83,18 %
2	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Rp. 38.489.280,-	Rp. 29.915.670,-	77,72 %
a.	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 38.489.280,-	Rp. 29.915.670,-	77,72 %
-	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp. 38.489.280,-	Rp. 29.915.670,-	77,72 %

**c. Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi PMD/K**

1. Terbatasnya usulan perencanaan pembangunan pada hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang diusulkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten.
2. Kurangnya koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam sinkronisasi dan harmonisasi program, kegiatan untuk keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Kurangnya pengetahuan tentang peraturan-peraturan bagi aparatur desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Dana Desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten, maupun Dana Desa dari Kementerian Desa dan PDT yang berasal dari Dana APBN.

**d. Solusi atas Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi PMD/K**

1. Melakukan skala prioritas untuk usulan perencanaan pembangunan serta pendekatan kepada anggota legislatif sesuai daerah pemilihan (dapil) untuk dimasukkan pada usulan pokok pikiran (pokir) DPRD.
2. Melakukan indentifikasi program dan kegiatan desa yang di susun oleh aparatur desa akan di selaraskan dengan Rencana Kerja SKPD, RPJMD dan visi misi Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah sehingga percepatan pelaksanaan program kegiatan pembangunan dapat direalisasikan bagi masyarakat desa.
3. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa bagi aparatur desa dalam penataan administrasi dokumen pertanggungjawaban (SPJ) yang di dukung dengan aplikasi sistem manajemen keuangan desa sehingga tidak terjadi penyimpangan keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan desa.

**e. Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada Seksi PMD/K yaitu :**

1. Meningkatkan perbaikan kualitas rancangan kerja awal usulan perencanaan pembangunan yang terdiri dari usulan aspirasi masyarakat, pokok pikiran DPRD (Pokir DPRD) dimulai Musyawarah Desa (Musdes), Musrenbang Kecamatan.
2. Mengikutsertakan perwakilan masyarakat dari tiap RT/RW dalam setiap program kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud agar masyarakat juga dapat turut memahami, mengerti, mengawal, dan mengawasi jalannya pelaksanaan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk penyusunan standar satuan harga (SSH) dan Pelaporan Aset Desa sebagai lampiran penyusunan Laporan Keuangan Desa.

### 3) Kepala Seksi Kemasyarakatan

Tabel 30. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Kemasyarakatan TA. 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
1. Memberikan pembinaan kepada kelompok organisasi masyarakat di Bidang Kemasyarakatan	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina dibidang kemasyarakatan	15 Kelompok	15 kelompok	15 Kelompok	100 %
2. Memfasilitasi kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga di tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan di bidang sosial, keagamaan kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100 %
3. Memfasilitasi penyaluran bantuan sosial di kecamatan	Jumlah masyarakat tidak mampu yang di fasiliasi penyaluran bantuan social	1000 orang	1000 orang	1000 orang	85,4 %

Kegiatan pembinaan kelompok organisasi masyarakat di bidang kemasyarakatan di Kecamatan Pelaihari yaitu Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kecamatan Pelaihari. Fasilitas dan pembinaan terutama dalam dalam rangka mempersiapkan kontingen Kecamatan Pelaihari untuk lomba MTQ tingkat Kabupaten Tanah Laut yang dilaksanakan pada Tahun 2023 di Kecamatan Kintap.

Fasilitas kegiatan dibidang sosial keagamaan, kebudayaan dan olahraga di tingkat kecamatan yang di targetkan 3 kegiatan terealisasi 3 kegiatan (100 %) yaitu kegiatan Pengirman Kafilah Kec. Pelaihari mengikuti Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tahun 2023 Tingkat Kabupaten di Kecamatan Kintap, kafilah Kecamatan Pelaihari mendapatkan juara 1 se Kabupaten Tanah Laut untuk 2 tahun berturut-turut.



Gambar 6. Kafilah MTQ Kecamatan Pelaihari pada MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 di Kecamatan Bati-bati

Kegiatan lain yang dilaksanakan kasi kemasyarakatan yakni Safari Ramadhan dan buka Puasa Bersama Bupati dan Waki Bupati Tanah Laut bersama masyarakat pada bulan ramadhan.



Gambar 7. Safari Ramadhan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut dengan Masyarakat Desa Sumber Mulya pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2023

Selain itu kegiatan yang dilaksanakan Kasi Kemasyarakatan yaitu Sosialisasi Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab. Tanah Laut yaitu Program Visi dan Misi Kepala Daerah Pemberian Hibah 1 miliar untuk Kecamatan dengan organisasi kemasyarakatan yang menerima hibah sebanyak 17 organisasi dengan jumlah organisasi yang merealisasikan sebanyak 15 organisasi, 1 organisasi tidak melaksanakan karena ada permasalahan baik masalah administrasi maupun kendala di internal organisasi sedangkan 1 organisasi tidak melaksanakan karena adanya usulan yang sama ke kabupaten.

**a. Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Kemasyarakatan**

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi Kemasyarakatan di Kec. Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang Kasi Kemasyarakatan (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 1 (satu) orang staf ASN (jabatan pelaksana) dengan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi Kemasyarakatan yaitu melakukan kegiatan fasilitasi kafilah Kec. Pelaihari mengikuti kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 di Kec. Kintap, kegiatan Buka Puasa bersama Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut beserta masyarakat pada bulan ramadhan Tahun 1444 h di Desa Sumber Mulya, Sosialisasi Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

**b. Analisis Penggunaan Sumberdaya Anggaran Seksi Kemasyarakatan**

Dalam menjalankan kegiatannya Seksi Kemasyarakatan ditunjang dengan 1 (satu) Program 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran Rp. 1.209.373.308,- (Satu milyar dua ratus Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 1.126.931.560,- (Satu milyar seratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 31. Realisasi Program Penunjang pada Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Persentase Capaian (%)
1.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Rp. 1.209.373.308,-	Rp. 1.126.931.560,-	93,18 %
a.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 1.209.373.308,-	Rp. 1.126.931.560,-	93,18 %
-	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp. 1.209.373.308,-	Rp. 1.126.931.560,-	93,18 %

**c. Permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran hibah yaitu :**

Belum tertibnya organisasi kemasyarakatan dalam melakukan penatausahaan, pertanggungjawaban serta pelaporan dana hibah karena kuitansi yang dibelanjakan tidak mengikuti RAB pencairan dan lampiran pendukung SPJ nya.

**d. Solusi yang dilakukan dalam penyaluran hibah yaitu :**

Melakukan Sosialisasi Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Hibah kepada organisasi penerima hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**e. Rencana Aksi yang akan dilakukan yaitu :**

Menyusun draft tahapan penyampaian dan verifikasi proposal, serta menyesuaikan satuan standar harga yang dibuat Pemerintah Daerah Kab. Tanah Laut sehingga rencana anggaran biaya (RAB) memakai Standar Harga Pemerintah Daerah dengan bimbingan Seksi Kesmas Kecamatan Pelaihari.

#### 4) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tabel 32. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban TA. 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
1. Memfasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang di fasilitasi	2 kejadian	2 Kejadian	2 Kejadian	100 %
2. Membina kelompok masyarakat di Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah kelompok masyarakat di Bidang Ketenraman dan Ketertiban yang aktif	10 kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	100 %
3. Monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	2 kejadian	2 Kejadian	2 Kejadian	100 %
4. Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban di kecamatan	Jumlah sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan keertiban masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	1 kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100 %
5. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	0 kali	2 kali	2 kali	100 %

Pembinaan kelompok masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban yang aktif melalui kelompok perlindungan Masyarakat (Linmas)

yang ada di 15 (lima belas) desa dan 5 (lima) Kelurahan yang ada di kecamatan Pelaihari.

Jumlah Penanganan Gangguan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Pelaihari yang di monitoring selama tahun 2023 terealisasi 2 (dua) penanganan yaitu;

1. Patroli bersama dengan Satpol PP, Polsek dan Danramil kecamatan Pelaihari ke warung-warung malam. Melakukan penertiban dan sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat.



Gambar 8. Operasi Gabungan Penertiban Warung Malam

2. Bersama Danramil, Kapolsek, Kementrian Agama dan warga masyarakat sekitar melakukan musyawarah dalam rangka menyelesaikan masalah belum adanya ijin pendirian tempat ibadah (gereja) dan melakukakan kegiatan keagamaan yang dianggap mengganggu Masyarakat di Kelurahan Angsau.



Gambar 9. Mediasi izin Pendirian Tempat Ibadah

- a. **Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kec. Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang Kasi Trantib (Pejabat Pengawas) dengan



dibantu 1 (satu) orang staf ASN dengan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi Ketentraman dan Ketertiban yaitu melakukan kegiatanfasilitasi penanganan gangguan dan keamanan, membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban, sosialisasi dan monitoring penanganan gangguan ketentaman dan ketertiban .

**b. Analisis mengenai Sumber Daya Anggaran pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Dalam menjalankan Kegiatan Seksi PMD/K di tunjang dengan 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 56.378.650,- (Lima puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 55.725.660,- (Lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 31 berikut ;

Tabel 33. Realisasi Program Penunjang pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Persentase Capaian (%)
1.	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Rp. 7.965.540,-	Rp. 7.705.000,-	96,73 %
a.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 7.965.540,-	Rp. 7.705.000,-	96,73 %
-	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 7.965.540,-	Rp. 7.705.000,-	96,73 %
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Rp. 48.413.110,-	Rp. 48.020.660,-	99,19 %
a.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 48.413.110,-	Rp. 48.020.660,-	99,19 %
-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp. 48.413.110,-	Rp. 48.020.660,-	99,19 %

**c. Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Rendahnya kesadaran pemilik warung dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat karena itu merupakan

penghasilan dari warga pemilik warung atau lahan sedangkan mereka tidak menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dengan maraknya warung-warung tersebut

**d. Solusi atas Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat dengan meminta bantuan dan dukungan dari para tokoh pemuka agama, tokoh masyarakat beserta forkompimcam Kec. Pelaihari untuk menjaga Ketentraman dan ketertiban

**e. Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban yaitu :**

Melakukan sinergi dan koordinasi kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah

**5) Kepala Seksi Pelayanan**

Pencapaian Sasaran strategis Kasi Pelayanan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Pelaihari, salah satu kegiatan yang dilaksanakandalam program ini adalah melakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),dimana hasil dari pelaksanaan SKM ini adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 yakni nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana Kecamatan Pelaihari pada Tahun 2023 memperoleh IKM sebesar 3,522 (88,04) dengan mutu pelayanan berkategori sangat baik.

Tabel 34. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pelayanan TA. 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
1. Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP	15 pelayanan	15 pelayanan	15 pelayanan	100 %
2. Memfasilitasi penanganan Aduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang di fasilitasi	5 pengaduan	5 Pengaduan	0 Pengaduan	0 %
3. Menyusun Data informasi Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN)	Jumlah Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	2 dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %

Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tahun 2023 sebanyak 15 Jenis Produk Pelayanan dapat

terealisasi penuhnya (100%). Adapun jenis pelayanan yang dimaksud sebagai berikut :

A. Pelayanan Non Perizinan

1. Rekomendasi Perizinan
2. Rekomendasi Nikah
3. Pengantar Pindah Domisili
4. Pengantar KTP
5. Pengantar Kartu Keluarga
6. Legalisasi Permohonan Perizinan
7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
8. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
9. Legalisasi Surat Keterangan Ghaib
10. Legalisasi Proposal Bantuan
11. Legalisasi Surat Keterangan Berkelakuan Baik
12. Legalisasi Surat Izin Keramaian
13. Legalisasi Surat Kehilangan
14. Legalisasi Surat Keterangan Usaha

B. Pelayanan Perizinan

1. Izin Usaha Mikro dan Kecil

PATEN telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di Kantor Kecamatan Pelaihari. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP sebanyak 15 jenis pelayanan non perizinan dan 4 pelayanan perizinan telah memenuhi target indikator tahun 2023 dengan capaian target 100%. Volume / Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan Legalisasi Surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Pelaihari. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan realisasi pelayanan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 35. Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Jumlah pelayanan	Keterangan
1	Pelayanan Rekomendasi Perizinan	-	Seksi Pelayanan
2	Pelayanan Rekomendasi Nikah	143	Seksi Kemasyarakatan
3	Pelayanan Pindah Domisili	10	Seksi Tapem
4	Pelayanan Pengantar KTP	-	Seksi Tapem
5	Pelayanan Pengantar Kartu Keluarga	-	Seksi Tapem
6	Pelayanan Legalisasi Permohonan Perizinan	-	Seksi Pelayanan
7	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak	507	Seksi Kemasyarakatan

No	Jenis Pelayanan	Jumlah pelayanan	Keterangan
	Mampu (SKTM)		
8	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	283	Seksi Pelayanan
9	Pelayanan Surat Keterangan Ghoib	-	Seksi Pelayanan
10	Pelayanan Proposal Bantuan	-	Seksi Kemasyarakatan
11	Pelayanan Surat Keterangan Berkelakuan Baik	20	Seksi Pelayanan
12	Pelayanan Surat Izin Keramaian	-	Seksi Trantib
13	Pelayanan Surat Kehilangan	-	Seksi Pelayanan
14	Pelayanan Surat Keterangan Usaha	4	Seksi Pelayanan
15	Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil	10	Seksi Pelayanan
16	Pelayanann Izin Bilyard Non Komersial	-	Seksi Pelayanan
17	Pelayanan Izin Playstation/Video Game	-	Seksi Pelayanan

Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang disusun dalam bentuk laporan kegiatan seksi Pelayanan. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 88,04 dari 150 responden yang mengisi kuisioner.



Gambar 10. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut

**a. Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Pelayanan**

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi pelayanan di Kec. Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 4 (dua) orang yaitu 1 orang Kasi pelayanan (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 1 (satu) orang staf ASN (Jabatan Pelaksana) dan 2 (dua) orang Non PNS dengan menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi Pelayanan yaitu melakukan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

**b. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada Kasi Pelayanan**

Pada tahun 2023, seksi Pelayanan tidak mendapatkan anggaran dikarenakan keterbatasan anggaran.

**c. Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Pelayanan**

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah belum adanya aplikasi Pelayanan Terpadu Kecamatan Pelaihari yang terhubung dengan Kelurahan dan Pemerintah Desa.

**d. Solusi Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Pelayanan**

Adapun solusi untuk memecahkan kendala yang dikemukakan diatas yaitu Mencoba mengembangkan aplikasi Pelayanan Terpadu Kecamatan Pelaihari.

Adapun rencana aksi untuk meningkatkan nilai Sakip yaitu :

- ❖ Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mendorong pengembangan aplikasi Pelayanan Terpadu Kecamatan.
- ❖ Melakukan pembuatan media sosial untuk mendukung informasi akan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan sebagai sarana informasi publik terhadap kinerja Kecamatan.

**e. Rencana Aksi yang dilaksanakan pada Seksi Pelayanan**

Melakukan komitmen pelayanan sesuai Zona Integritas (ZI) yang kuat pada personel/SDM Kecamatan Pelaihari agar pelayanan terpadu kecamatan kepada masyarakat lingkup Kecamatan Pelaihari.

**6) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Tabel 36. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Sub Umum dan Kepegawaian TA. 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
1. Memberikan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik	17 orang	18 orang	18 orang	100 %
2. Pemenuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	223 unit	223 Unit	223 unit	100 %
3. Memberikan pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	15 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	100 %

Jumlah pegawai dilingkup Kantor Kecamatan Pelaihari sebanyak 26 (dua puluh enam) orang yaitu 18 (delapan belas) orang ASN dan 8 (delapan) orang PTT. Semua kebutuhan administrasi perkantoran terlayani dengan baik. Realisasi Target indikator kinerja mencapai 100%.

Jumlah sarana prasarana yang terpelihara dengan baik dan memadai sebagai sarana dan penunjang kegiatan sebanyak 185 unit yang terdaftar dalam inventarisasi barang dalam kondisi baik dan sisanya dalam kondisi rusak berat.

Jumlah dokumen administrasi kepegawaian sampai dengan per 31 Desember 2023 sebanyak 18 (delapan belas) ASN. Administrasi kepegawaian saat ini sudah menggunakan aplikasi SIMPeg yang memudahkan proses pencatatan dan pengolahan data dan informasi kepegawaian yang diminta. Realisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2023 sudah dilaksanakan penilaian oleh pimpinan sesuai tingkatannya dan ASN Lingkup Kecamatan Pelaihari tidak ada yang memiliki nilai rata-rata kurang atau sangat kurang.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Tahun Anggaran 2023 antara lain melaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, pemeliharaan kendaraan dinas atau operasional lainnya serta pembayaran honorarium pegawai tidak tetap.

**a. Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Dalam menjalankan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Kec. Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 5 (lima) orang yaitu 1 (Satu) orang Kasubbag Umum & Kepegawaian (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 2 (dua) orang orang staf ASN (Jabatan Pelaksana) dan 2 (dua) orang Non PNS dengan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian yaitu melakukan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, pemenuhan sarana dan prasarana kantor, serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian.

**b. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada Sub Bagian Umum & Kepegawaian**

Dalam menjalankan kegiatan selama tahun anggaran 2023, sub bagian umum dan kepegawaian ditunjang oleh 1 (satu) program, 3 (tiga) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 761.920.198,- (Tujuh ratus enam puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh ribu seratus Sembilan puluh delapan rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 727.495.963,- (Tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus Sembilan puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh tiga rupiah).

Tabel 37. Realisasi Program Penunjang pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Capaian Persentase (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	761.920.198,00	727.495.963,00	95,48
a.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	447.492.214,00	420.022.456,00	93,86
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.262.410,00	6.534.500,00	89,98
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.254.824,00	134.211.068,00	88,15
-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.806.502,00	26.606.445,00	86,37
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.451.038,00	9.031.000,00	78,87
-	Penyediaan Bahan/Material	9.967.440,00	8.905.000,00	89,34
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	750.000,00	750.000,00	100,00
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.000.000,00	233.984.443,00	99,57
B	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	237.127.984,00	232.014.363,00	97,84
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.050.000,00	36.533.487,00	89,00
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.077.984,00	195.480.876,00	99,70
C	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77.300.000,00	75.459.144,00	97,62
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	29.988.500,00	99,96
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.500.000,00	38.670.644,00	95,48
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00

**c. Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah kurangnya petugas staf/ASN pengelola kearsipan dalam mengerjakan tugas mengelola arsip di Kecamatan Pelaihari.

**d. Solusi permasalahan yang akan dilaksanakan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :**

Melakukan usulan penambahan personel staf/ASN pengelola kearsipan yang mempunyai keahlian menyusun arsip, menata arsip, didukung sarana dan prasarana ruang arsip yang memadai.

**e. Rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Memberdayakan pegawai PTT yang ada membantu dalam mengelola kearsipan yang ada di Kecamatan Pelaihari.

**7) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Tabel 38. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Sub Perencanaan dan Keuangan TA. 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Persentase Capaian
1. Menyusun Dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	7 dokumen	7 dokumen	7 Dokumen	100 %
2. Menyusun Laporan Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100 %

Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain Dokumen Renstra 2024-2026, Dokumen Renja 2023, Dokumen Renja 2023 Perubahan, Dokumen DPA dan DPA-Perubahan 2023. Dengan demikian realisasi capaian target sesuai target (100%).

Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Laporan Kinerja Pemerintahan 2023, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2023, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2022 dan Laporan Keuangan semesteran dan prognosis 2023. Dengan demikian realisasi capaian target mencapai 100%



**a. Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sub Perencanaan dan Keuangan**

Dalam menjalankan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan di Kec. Pelaihari dengan jumlah personil ASN sebanyak 4 (empat) orang yaitu 1 orang Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 2 orang staf ASN (Jabatan Pelaksana) dan 1 (satu) orang Non ASN dengan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan dan Keuangan yaitu melakukan kegiatan perencanaan kinerja dan keuangan, laporan keuangan dan laporan kinerja.

**b. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan**

Dalam menjalankan kegiatan selama tahun anggaran 2023, sub bagian Keuangan dan Perencanaan ditunjang oleh 1 (satu) program, 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 9.769.147.647,- (Sembilan milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 8.941.527.114,- (Delapan milyar Sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah).

Tabel 39. Realisasi Program Penunjang pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Capaian Persentase (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.769.147.647,00	8.941.527.114,00	91,53
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.985.000,00	3.925.000,00	98,49
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.825.000,00	2.825.000,00	100,00
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.160.000,00	1.100.000,00	94,83
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.765.162.647,00	8.937.602.114,00	91,53
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.764.662.647,00	8.937.102.114,00	91,52

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Capaian Persentase (%)
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500.000,00	500.000,00	100,00

**c. Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan**

1. Kurangnya personel staf/ASN yang menangani kegiatan laporan perencanaan SKPD (Laporan Renja APBD dan Renja Perubahan APBD, Laporan Perjanjian Kinerja (PK) Laporan Monev per Triwulan, serta Laporan Keuangan SKPD (Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Laporan Akhir Tahun).
2. Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi staf subbag perencanaan dan keuangan dalam update peraturan perundangan bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang pengelolaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah untuk menyusun laporan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan manual maupun aplikasi yang telah disediakan oleh kemendagri RI dan Kemenkeu RI.

**d. Solusi permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan**

1. Melakukan penambahan personel staf/ASN subbag Perencanaan dan Keuangan yang menangani kegiatan laporan perencanaan SKPD (Laporan Renja APBD dan Renja Perubahan APBD, Laporan Perjanjian Kinerja (PK) Laporan Monev per Triwulan, serta Laporan Keuangan SKPD (Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Laporan Akhir Tahun).
2. Melakukan usulan anggaran kepada SKPD terkait mengenai pendidikan dan pelatihan bagi staf/ASN Subbag Perencanaan dan Keuangan mengikuti Bimtek, Diklat bidang perencanaan daerah, pengelolaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah

**e. Rencana aksi permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan**

1. Melakukan transfer *knowledge* kepada staf/ASN subbag perencanaan dan keuangan dalam rangka pemerataan pembagian tugas dan pekerjaan agar penyelesaian kerja menjadi tepat waktu sesuai aturan perundangan-undangan.
2. Melakukan pemanfaatan staf/ASN perencanaan dengan menggunakan hardware, software untuk penyusunan perencanaan daerah, pengelolaan penatausahaan pertanggungjawaban, pelaporan keuangan daerah sebagai SKPD yang mempunyai kewajiban melaporkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Secara keseluruhan rata-rata capaian realisasi terhadap target tahun 2023 untuk eselon IV mencapai 100 %. Untuk lebih jelasnya Realisasi Target Indikator Kinerja eselon IV tahun 2022-2023 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel 33.

Tabel 40. Realisasi Target Indikator Kinerja Eselon IV Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun 2022-2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	15 Desa	15 Desa	15 Desa	100
2.	Jumlah desa yang difasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Penjaringan aparat desa dan BPD	15 Desa	15 Desa	5 Desa	33,33
3.	Jumlah Desa yang data Kependudukannya terverifikasi dengan akurat	15 Desa	15 Desa	15 Desa	100
4.	Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	2 kali	2 kali	2 kali	100
5.	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	5 Kelompok	5 Kelompok	5 Kelompok	100
6.	Jumlah desa yang menyusun profil desa dengan baik	15 desa	15 desa	15 desa	100
7.	Jumlah desa yang mengelola keuangan dengan baik	15 desa	15 desa	15 desa	100
8.	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan Musrenbang	2 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100
9.	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang di bina di bidang kemasyarakatan	15 Kelompok	15 kelompok	15 Kelompok	100
10.	Jumlah kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga sesuai SOP	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	100
11.	Jumlah masyarakat tidak mampu yang di fasilitasi penyaluran bantuan social	854 orang	1000 orang	1000 orang	100
12.	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang difasilitasi	2 kejadian	2 kejadian	2 kejadian	100
13.	Jumlah kelompok masyarakat di bidang Ketentraman dan ketertiban yang aktif	5 Kelompok	5 kelompok	5 Kelompok	100
14.	Jumlah penanganan gangguan dan	2 kejadian	2 kejadian	2 kejadian	100

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
	ketertiban masyarakat di Kecamatan yang di monitoring				
15.	Jumlah sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat masyarakat di Kecamatan yang di monitoring	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100
16.	Jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PATEN) sesuai SOP	15 pelayanan	15 pelayanan	15 pelayanan	100
17.	Jumlah pengaduan masyarakat yang di fasilitasi	1 Pengaduan	5 pengaduan	0 Pengaduan	0
18.	Jumlah Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100
19.	Jumlah ASN yang administrasi perkantornya terlayani dengan baik	18 orang	18 orang	18 orang	100
20.	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	223 unit	223 unit	223 unit	100
21.	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	15 dokumen	15 dokumen	15 dokumen	100
22.	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	7 Dokumen	7 dokumen	7 Dokumen	100
23.	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 Dokumen	7 dokumen	7 Dokumen	100
<b>Rata-Rata Capaian</b>					<b>95,45</b>

### 1) Perbandingan realisasi dengan target

Dari hasil realisasi target sasaran dan indikator kinerja eselon IV tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 ada beberapa capaian yang mengalami kenaikan yaitu Jumlah masyarakat tidak mampu yang di fasilitasi penyaluran bantuan sosial (100%).

Sebaliknya realisasi target sasaran dan indikator kinerja eselon IV tahun 2023 melampaui target seperti Jumlah ASN yang administrasi perkantornya terlayani dengan baik (100 %).

Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat di Kecamatan Pelaihari tahun 2023 sebanyak 0 kejadian dari target 0 kejadian. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah merasa puas dalam mendapatkan pelayanan karena tidak dikenakan tarif biaya (gratis).

Jumlah desa yang difasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan Pemilu, Pilkada, dan Penjaringan aparat desa dan BPD hanya 5 desa yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa dari 15 desa yang ada di Kecamatan Pelaihari.

Dengan terbukanya informasi publik berimplikasi pada transparansi pemerintah dalam membuat sebuah aturan atau kebijakan. Sementara itu, sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah, baik dalam bentuk pengawasan pelaksanaan kebijakan, maupun laporan masyarakat terhadap suatu tindak pelanggaran bisa disampaikan melalui layanan pengaduan.

**2) Perbandingan realisasi dengan Realisasi Terkait**

Realisasi kinerja berdasarkan rata-rata capaian tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 untuk kinerja eselon IV mengalami kenaikan dari 93,13 % menjadi 95,45%.

**3) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP dari target 3 kegiatan terlaksana 3 kegiatan (100 %) yaitu pelaksanaan Pengiriman Kafilah MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 di Kecamatan Kintap, kegiatan buka puasa bersama/safari ramadhan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut beserta unsur forkompimda serta kepala SKPD dengan masyarakat Kecamatan Pelaihari, pelaksanaan Hibah 1 Milyar bagi organisasi masyarakat dalam bidang keagamaan, kepemudaan, seni dan budaya.

**4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja**

Dari 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan yang diamanatkan kepada Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 yaitu Pagu APBD Murni Awal sebesar Rp. 11.607.720.392.- setelah APBD perubahan menjadi sebesar Rp. 11.862.514.803,- terjadi kenaikan anggaran sebesar 1,21%. Sedangkan Realisasi belanja sebesar Rp. 10.904.945.967,- dengan capaian sebesar 91,93 % dari pagu Perubahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Pelaihari yang ada pada tabel di bawah ini.

Tabel 41. Realisasi Anggaran Kecamatan Pelaihari Tahun 2023

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	
				(%)	(Rp)		Rp	%
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.257.573.434,00</b>	<b>10.531.067.845,00</b>	100,00%	10.531.067.845,00	99,93%	9.669.023.077,00	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.985.000,00</b>	<b>3.985.000,00</b>	100,00%	3.985.000,00	100,00%	3.925.000,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.985.000,00	2.825.000,00	100,00%	2.825.000,00	100,00%	2.825.000,00	100,00%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.160.000,00	100,00%	1.160.000,00	100,00%	1.100.000,00	94,83%
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.645.162.647,00</b>	<b>9.765.162.647,00</b>	100,00%	9.765.162.647,00	100,00%	8.937.602.114,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.644.662.647,00	9.764.662.647,00	100,00%	9.764.662.647,00	100,00%	8.937.102.114,00	91,52%
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>315.683.299,00</b>	<b>447.492.214,00</b>	100,00%	447.492.214,00	98,27%	420.022.456,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.262.410,00	7.262.410,00	100,00%	7.262.410,00	100,00%	6.534.500,00	89,98%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.590.204,00	152.254.824,00	100,00%	152.254.824,00	100,00%	134.211.068,00	88,15%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.629.647,00	30.806.502,00	100,00%	30.806.502,00	100,00%	26.606.445,00	86,37%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.451.038,00	11.451.038,00	100,00%	11.451.038,00	100,00%	9.031.000,00	78,87%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0,00	9.967.440,00	100,00%	9.967.440,00	100,00%	8.905.000,00	89,34%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	750.000,00	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.000.000,00	235.000.000,00	100,00%	235.000.000,00	96,70%	233.984.443,00	99,57%
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>215.442.488,00</b>	<b>237.127.984,00</b>	100,00%	237.127.984,00	100,00%	232.014.363,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.050.000,00	41.050.000,00	100,00%	41.050.000,00	100,00%	36.533.487,00	89,00%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.392.488,00	196.077.984,00	100,00%	196.077.984,00	100,00%	195.480.876,00	99,70%
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>77.300.000,00</b>	<b>77.300.000,00</b>	100,00%	77.300.000,00	100,00%	75.459.144,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	29.988.500,00	99,96%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.500.000,00	40.500.000,00	100,00%	40.500.000,00	100,00%	38.670.644,00	95,48%

Tabel 41. Realisasi Anggaran Kecamatan Pelaihari Tahun 2023

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	
				(%)	(Rp)		Rp	%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00%	6.800.000,00	100,00%	6.800.000,00	100,00%
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>38.489.280,00</b>	<b>38.489.280,00</b>	100,00%	38.489.280,00	100,00%	29.915.670,00	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>38.489.280,00</b>	<b>38.489.280,00</b>	100,00%	38.489.280,00	100,00%	29.915.670,00	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38.489.280,00	38.489.280,00	100,00%	38.489.280,00	100,00%	29.915.670,00	77,72%
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>7.965.540,00</b>	<b>7.965.540,00</b>	100,00%	7.965.540,00	100,00%	7.705.000,00	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>7.965.540,00</b>	<b>7.965.540,00</b>	100,00%	7.965.540,00	100,00%	7.705.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.965.540,00	7.965.540,00	100,00%	7.965.540,00	100,00%	7.705.000,00	96,73%
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>1.276.486.418,00</b>	<b>1.257.786.418,00</b>	100,00%	1.257.786.418,00	100,00%	1.174.952.220,00	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>1.276.486.418,00</b>	<b>1.257.786.418,00</b>	100,00%	1.257.786.418,00	100,00%	1.174.952.220,00	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.214.073.308,00	1.209.373.308,00	100,00%	1.209.373.308,00	100,00%	1.126.931.560,00	93,18%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	62.413.110,00	48.413.110,00	100,00%	48.413.110,00	100,00%	48.020.660,00	99,19%
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>27.205.720,00</b>	<b>27.205.720,00</b>	100,00%	27.205.720,00	100,00%	23.350.000,00	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>27.205.720,00</b>	<b>27.205.720,00</b>	100,00%	27.205.720,00	100,00%	23.350.000,00	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.812.440,00	4.812.440,00	100,00%	4.812.440,00	100,00%	4.575.000,00	95,07%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.393.600,00	2.393.600,00	100,00%	2.393.600,00	100,00%	2.140.000,00	89,41%
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19.999.680,00	19.999.680,00	100,00%	19.999.680,00	100,00%	16.635.000,00	83,18%
		<b>11.607.720.392</b>	<b>11.862.514.803</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.862.514.803</b>	<b>99,93%</b>	<b>10.904.945.967</b>	<b>91,93%</b>

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Kecamatan Pelaihari pada tahun 2023 menganggarkan jumlah Anggaran Belanja sebelum perubahan sebesar Rp. 11.607.720.392.-.

Setelah pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan anggaran belanja sebesar Rp. 11.862.514.803,- dengan Realisasi belanja sebesar Rp. 10.904.945.967,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 91,93% dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 1.483.300.652.- (13,13%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 42. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Kecamatan Pelaihari Tahun Anggaran 2023

No.	URAIAN	PAGU MURNI 2023	PAGU PERUBAHAN 2023	REALISASI (Rp).	(%)
1	BELANJA	11.607.720.392,-	11.862.514.803,-	10.904.945.967,-	91,93
	a. BELANJA OPERASI	11.512.238.325,-	11.712.806.261,-	10.770.153.399,-	91,95
	b. BELANJA MODAL	95.482.067,-	149.708.542,-	134.792.568,-	90,04

Tabel 43. Sasaran Strategis, Program, Pagu dan Realisasi Kecamatan Pelaihari

No	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Program	Anggaran (Rp).	Realisasi (Rp).	Persentase (%)
1.	Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9.769.147.647	Rp8.941.527.114	91,53
2.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 761.920.198	Rp 727.495.963	95,48
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 38.489.280	Rp 29.915.670	77,72
		Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 7.965.540	Rp 7.705.000	96,73
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 1.257.786.418	Rp1.174.952.220	93,41
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 27.205.720	Rp 23.350.000	85,83
<b>JUMLAH</b>			<b>11.862.514.803</b>	<b>10.904.945.967</b>	<b>91,93</b>



Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 95,65% maka realisasi keuangan sebesar 91,93% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 44. Realisasi Persentase Keuangan, Fisik dan Efisiensi Sasaran Strategis Kecamatan Pelaihari Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	% Keuangan	% Fisik	% Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	91,53	99,84	12,94
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan	95,48	100	13,01
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	92,83	100	25,10

## 2. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

Pada tahun 2022 ada 4 Program dan 7 kegiatan dan 12 Sub Kegiatan, dibandingkan tahun 2023 ada 5 program dan 7 kegiatan dan 23 sub kegiatan. Adapun untuk anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 11.862.514.803,- (Sebelas milyar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus empat belas ribu delapan ratus tiga rupiah) mengalami kenaikan dibandingkan anggaran tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 11.290.527.596,- (Sebelas milyar dua ratus Sembilan puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh enam rupiah). Untuk lebih jelasnya perbandingan jumlah Program dan Kegiatan dan pagu 2022 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 45. Perbandingan Program dan Kegiatan serta Pagu Anggaran Kecamatan Pelaihari Tahun 2022-2023

TAHUN 2022			TAHUN 2023		
Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
4	7	12	5	7	23
Total Anggaran			Total Anggaran		
Rp. 11.290.527.596,-			Rp. 11.862.514.803,-		

Adapun realisasi Belanja pada tahun 2023 sebesar Rp. 10.904.945.967,- (Sepuluh milyar sembilan ratus empat juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp. 9.407.265.490,- (Sembilan milyar empat ratus tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus Sembilan puluh rupiah) mengalami kenaikan realisasi dibanding tahun 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 46. Perbandingan Realisasi Belanja dan Pendapatan pada Kecamatan Pelaihari Tahun 2022-2023

NO.	URAIAN	REALISASI (Rp)	
		2022	2023
1.	<b>PENDAPATAN</b>	<b>Rp. 0,-</b>	<b>Rp. 0,-</b>
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>Rp. 0,-</b>	<b>Rp. 0,-</b>
	Retribusi Daerah	Rp. 0,-	Rp. 0,-
2.	<b>BELANJA</b>	<b>Rp. 9.407.265.490,-</b>	<b>Rp.10.904.945.967,-</b>
	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>Rp. 9.393.075.490,-</b>	<b>Rp. 10.770.153.399,-</b>
	Belanja Pegawai	Rp. 7.788.182.216,-	Rp. 8.937.102.114,-
	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 1.177.513.274,-	Rp.904.611.285,-
	Belanja Hibah	Rp. 427.380.000,-	Rp 928.440.000,-
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp. 14.190.000,-</b>	<b>Rp. 134.792.568,-</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 14.190.000,-	Rp. 134.792.568,-
	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Rp. 0,-	Rp. 0,-

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban terakhir terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018–2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama dengan tingkat capaian kinerja sangat memuaskan. Indikator kinerja program yang terdiri dari 3 sasaran dan 23 Indikator kinerja** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator sementara adalah 91,93. % dengan rincian 18 (delapan belas) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Memuaskan**, 1 indikator dengan tingkat kinerja **Baik**, 3 (tiga) indikator dengan tingkat capaian kinerja **Cukup**, dan 1 dengan nilai **kurang**.

### **B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA**

Adapun strategi peningkatan kinerja dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran dalam meningkatkan penerapan SAKIP lingkup SKPD Kecamatan Pelaihari
2. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi Kecamatan Pelaihari dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Menerapkan perjanjian kinerja hingga ke level pelaksana.
4. Membangun Budaya Kerja yang merubah *mind set* Aparatur Sipil yang dulunya berorientasi kepada Anggaran berubah kepada Capaian Kinerja yang menunjang visi misi Kabupaten.
5. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*cascadedown*), mulai dari level SKPD sampai dengan indikator kinerja level eselon III, eselon IV dan individu pegawai.
6. Meningkatkan SDM baik dari segi kuantitas dan kualitas yaitu dengan meminta tambahan pegawai baru dan mengikutsertakan dalam Diklat/Bimtek bagi pegawai lama.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik dan terus menjaga dan meningkatkan peran aktif dari semua aparaturnya kecamatan

serta komitmen untuk membangun kecamatan khususnya dan daerah pada umumnya

8. Demikian laporan kinerja Kecamatan Pelaihari ini dibuat semoga dapat menjadi bahan informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja.

Pelaihari, Januari 2024

Camat Pelaihari,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke ending in a small arrowhead.

**AGUS SETIYO, SSTP, M.M**

**Pembina / (IV/a)**

**NIP. 19850808 200412 1 001**

**LAMPIRAN 1**  
**INDIKATOR KINERJA**  
**UTAMA (IKU)**

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan  
Tahun 2023**

Kabupaten : Tanah Laut  
Nama SKPD : Kecamatan Pelaihari  
Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah  
Fungsi : a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.  
b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.  
c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan.  
d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.  
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.  
f. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan  
g. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat	1 Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan	Hasil survei	Semua Seksi di Kecamatan

Pelaihari, Januari 2023

Camat Pelaihari



AGUS SETIYO, SSTP, MM  
NIP.19850808 200412 1 001

**LAMPIRAN 2**  
**PERNYATAAN HASIL**  
**REVIU**



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT INSPEKTORAT

Jalan A.Syairani Kompl. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 22384 Pelaihari

Pelaihari, 27 Juni 2023

Nomor : 700.1.2.8/165/LHE-AKIP/Insp/ 2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas  
Akuntabilitas Kinerja Instansi  
Pemerintah (AKIP) Tahun 2022

Kepada Yth.  
Camat Pelaihari  
di-  
Pelaihari

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor : 68 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor : 800.1.11.1/ 231 / Insp/ 2023 tanggal 31 Mei 2023, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan tujuan :
  - a. Memperoleh informasi tentang implelementasi SAKIP;
  - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
  - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
  - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
  - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Internal. Dalam pelaksanaan evaluasi dokumen yang diperlukan adalah :



- a. Renstra SKPD
- b. Renja SKPD
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
- d. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- e. Perjanjian Kinerja (PK)
- f. Cascading/ Pohon Kinerja
- g. Laporan Kinerja
- h. Dokumen lain yang mendukung.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, memperoleh nilai sebesar 76,40 dengan kategori **BB (Sangat Baik)**, yaitu Kriteria Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja. Memiliki system kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 3/ koordinator.
4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi angka tertimbang dari seluruh komponen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. *Perencanaan Kinerja.*  
Diperoleh nilai sebesar 23,10 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 30%) dengan kategori **BB (Sangat Baik)**.
  - b. *Pengukuran Kinerja.*  
Diperoleh nilai sebesar 22,50 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 30%) dengan kategori **BB (Sangat Baik)**.
  - c. *Pelaporan Kinerja.*  
Diperoleh nilai sebesar 11,55 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 15% dengan kategori **BB (Sangat Baik)**.
  - d. *Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal*  
Diperoleh nilai sebesar 19,25 (hasil evaluasi dari yang diharapkan sebesar 25% dengan kategori **BB (Sangat Baik)**
5. Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi tahun sebelumnya, belum menyajikan bukti dokumen hasil tindak lanjut rekomendasi.

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan sebagaimana di atas, kami menyarankan kepada Camat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, sebagai berikut:

**a. Perencanaan Kinerja :**

- 1) Agar dilakukan penyelarasan terhadap indikator yang belum selaras pada dokumen perencanaan kinerja,
- 2) Agar dilakukan evaluasi secara berkala terhadap dokumen perencanaan kinerja sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan perbaikan pencapaian kinerja.
- 3) Agar dilakukan evaluasi terhadap target indikator kinerja yang masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**b. Pengukuran Kinerja :**

- 1) Agar dilakukan monitoring secara berkala atas pencapaian target kinerja, dan dilakukan berjenjang pada unit kerja dibawahnya sehingga akan diketahui kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja dan dibuat sebagai dasar perbaikan kinerja.
- 2) Agar dilakukan pemberian reward dan punishment atas hasil pencapaian target kinerja dari perjanjian kinerja yang telah disepakati, dan bila memungkinkan disampaikan pada kegiatan khusus.

**c. Pelaporan Kinerja :**

- 1) Untuk menjamin keandalan data kinerja, agar ditunjuk petugas yang menangani pengumpulan data kinerja.
- 2) Agar dibuat tabel dan Analisa yang memberikan informasi atas capaian target, sehingga dapat diketahui perhitungan capaian target yang sebenarnya.
- 3) Agar dilakukan reviu terhadap sasaran RPJMD, yaitu pada Misi 4 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat, Indikator Cakupan kinerja program aksi keagamaan dan sosial lingkup kecamatan, apakah menjadi sasar yang diampu.
- 4) Agar Laporan Kinerja mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja yang sesungguhnya, hal ini untuk mengetahui adanya peningkatan/ penurunan atas capaian target.
- 5) Agar dilakukan reviu berjenjang atas laporan kinerja yang disusun, sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai.

**d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :**

- 1) Agar Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berkala yang merupakan bentuk pemantauan dan mengendalikan kinerja dan dibuat rencana aksi hal ini untuk perbaikan dan akan diketahui target-target yang belum tercapai dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja
- 2) Agar saran hasil evaluasi APIP segera ditindaklanjuti, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan nilai hasil evaluasi yang akan datang.

Dan terhadap hasil monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya agar segera dilakukan, yaitu pada komponen Pelaporan kinerja agar dilakukan reuiu secara berjenjang dengan membuat laporan hasil reuiu.

Demikian disampaikan hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atas perhatian dan kerjasama yang baik di ucapkan terima kasih.

  
Drs. Joko Wuryanto, M. Si  
Perbina Utanra Muda (IV/c)  
NIP. 19650116-199203 1 008

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut di Pelaihari
2. Menteri PANRB di Jakarta
3. Arsip

**LEMBAR KERJA EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**UNIT KERJA : KECAMATAN PELAIHARI**  
**PERIODE EVALUASI : 2022**

NO.	KOMPONEN/ SUB KOMPONEN	BOBOT	KRITERIA	Nilai	% Tase
1	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>30.00</b>		<b>23.10</b>	<b>77.00%</b>
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	BB	4.80	80.00%
1)	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja				
2)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang				
3)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah				
4)	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek				
5)	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja				
6)	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja				
7)	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja				
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan ( <i>cascading</i> ) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> )	9.00	B	6.30	70.00%
1)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan				
2)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu				
3)	Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atau Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai				
4)	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai				
5)	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan				
6)	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART				
7)	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai ( <i>achievable</i> ), menantang, dan realistis				
8)	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara				
9)	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar				
10)	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih <i>on the right track</i> .				
11)	Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	BB	12.00	80.00%
1)	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai				
2)	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai				
3)	Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu dipantau secara berkala				
4)	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya				
5)	Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik				

6)	Setiap unit/satuan kerja berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
7)	Pimpinan terlibat dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
8)	Setiap Pegawai berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan				
9)	Kinerja Individu telah selaras dengan kinerja organisasi				
<b>2</b>	<b>PENGUKURAN KINERJA</b>	<b>30.00</b>		<b>22.50</b>	<b>75.00%</b>
<b>2.a</b>	<b>Pengukuran Kinerja telah dilakukan</b>	<b>8.00</b>	<b>BB</b>	<b>4.80</b>	<b>60.00%</b>
1)	Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja				
2)	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja				
3)	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan				
<b>2.b</b>	<b>Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan</b>	<b>9.00</b>	<b>BB</b>	<b>7.20</b>	<b>80.00%</b>
1)	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan				
2)	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan				
3)	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala				
4)	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang				
5)	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi)				
<b>2.c</b>	<b>Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien</b>	<b>15.00</b>	<b>B</b>	<b>10.50</b>	<b>70.00%</b>
1)	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja				
2)	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan				
3)	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional				
4)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi				
5)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja				
6)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja				
7)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja				
8)	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja				
9)	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja				

10)	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja				
11)	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja				
3	<b>PELAPORAN KINERJA</b>	<b>15.00</b>		<b>11.55</b>	<b>77.00%</b>
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	BB	2.40	80.00%
1)	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun				
2)	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala				
3)	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan				
4)	Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi				
5)	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan				
6)	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu				
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	B	3.15	70.00%
1)	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar				
2)	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja				
3)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan				
4)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah				
5)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya				
6)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)				
7)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatananya				
8)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja				
9)	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)				
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	BB	6.00	80.00%
1)	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab)				
2)	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai				
3)	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja				
4)	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja				
5)	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja				
6)	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya				
7)	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi				
4	<b>EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL</b>	<b>25.00</b>		<b>19.25</b>	<b>77.00%</b>
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	BB	4.00	80.00%
1)	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				

2)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah				
3)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang				
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	B	5.25	70.00%
1)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar				
2)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai				
3)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai				
4)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah				
5)	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi)				
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi kinerja	12.50	BB	10.00	80.00%
1)	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti				
2)	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal				
3)	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja				
4)	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja				
5)	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal				
<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja</b>		<b>100.00</b>		<b>76.40</b>	<b>76.40%</b>

Pengendali Teknis

Hj. Ruzmiah, STM  
NIP. 19651021 196602 2 005

Evaluator

Nurhidayat, SE, M.M  
NIP. 19810215 201001 1 017

Mengetahui :  
Irbah V

Mina Ayu Roswyda, ST  
NIP. 19800805 200501 2 014

**LAMPIRAN 3**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**TAHUN 2023**





# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN PELAIHARI

Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas No. Telp. (0512) 21029 Kode Pos 70814

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS SETIYO, S.STP, MM

Jabatan : Camat Pelaihari

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAMSIR RAHMAN

Jabatan : Pj. BUPATI TANAH LAUT

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

**SYAMSIR RAHMAN**

PIHAK PERTAMA

CAMAT PELAIHARI,

**AGUS SETIYO, S.STP, MM**  
NIP. 19850808 200412 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN PELAIHARI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	80

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

No	Proram	Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3.985.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9.765.162.647,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 447.492.214,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 237.127.984,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 77.300.000,00
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Rp 38.489.280,00
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 7.965.540,00
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 1.257.786.418,00
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 27.205.720,00

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Pj. BUPATI TANAH LAUT,



**SYAMSIR RAHMAN**

CAMAT PELAIHARI,



**AGUS SETIYO, SSTP, MM**  
NIP. 19850808 200412 1 001



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN PELAIHARI

Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas No. Telp. (0512) 21029 Kode Pos 70814

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. NOORDIANSYAH, SKM.,M.Kes

Jabatan : Sekretaris Camat

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : AGUS SETIYO, S.STP,MM

Jabatan : Camat Pelaihari

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK KEDUA

CAMAT PELAIHARI,

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS CAMAT,

AGUS SETIYO, S.STP, MM  
NIP. 19850808 200412 1 001

M. NOORDIANSYAH, SKM. M.Kes  
NIP. 19671013 198803 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN PELAIHARI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	60
		Nilai SAKIP	82
		Nilai Zona Integritas	51
2	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib sesuai SOP	100%
3	Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Persentase pengelolaan perencanaan pelaporan keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%

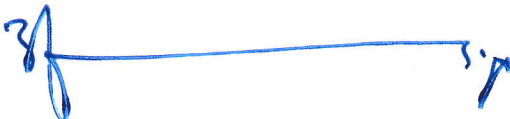
**PROGRAM DAN KEGIATAN**

No	Proram	Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3.985.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9.765.162.647,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 447.492.214,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 237.127.984,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 77.300.000,00

Pelaihari, 13 Oktober 2023

CAMAT PELAIHARI,

SEKRETARIS CAMAT,



**AGUS SETIYO, SSTP, M.M**  
NIP. 19850808 200412 1 001



**M. NOORDIANSYAH, SKM, M.Kes**  
NIP. 19671013 198803 1 004



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN PELAIHARI

Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas No. Telp. (0512) 21029 Kode Pos 70814

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hj. HENY YULIANA, S.Sos

Jabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertiban

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : AGUS SETIYO, S.STP, MM

Jabatan : Camat Pelaihari

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK KEDUA  
CAMAT PELAIHARI,

PIHAK PERTAMA  
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN,

**AGUS SETIYO, S.STP, MM**  
NIP. 19850808 200412 1 001

**Hj. HENY YULIANA, S.Sos**  
NIP. 19690402 199002 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN PELAIHARI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Memfasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban di kecamatan yang di fasilitasi	2 kejadian
2	Membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban	Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif	10 buah
3	Monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring	2 kejadian
4	Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang dimonitoring	Jumlah sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring	1 kegiatan
5	Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	2 kali

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

No	Proram	Kegiatan	Anggaran
1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 7.965.540,00
		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 7.965.540,00
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 48.413.110,00
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp 48.413.110,00

Pelaihari, 13 Oktober 2023

CAMAT PELAIHARI,



**AGUS SETIYO, SSTP, M.M**  
NIP. 19850808 200412 1 001

KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN,



**H. HENY YULIANA, S.SOS**  
NIP. 19690402 199002 2 001



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN PELAIHARI

Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas No. Telp. (0512) 21029 Kode Pos 70814

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR KECAMATAN PELAIHARI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURIAH, S.Sos  
Jabatan : Kasi Tata Pemerintahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : AGUS SETIYO, S.STP, MM  
Jabatan : Camat Pelaihari

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 20 Februari 2023

PIHAK KEDUA  
CAMAT PELAIHARI,

PIHAK PERTAMA  
KASI TATA PEMERINTAHAN,

**AGUS SETIYO, S.STP, MM**  
NIP. 19850808 200412 1 001

**NURIAH, S.Sos**  
NIP. 19740320 199503 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN PELAIHARI**

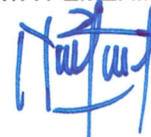
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Memfasilitasi pengelolaan administrasi pemerintah desa dan BPD	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	15 desa
2	Memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, pilkada dan pemilihan kepala desa serta penjaringan aparat desa dan BPD	Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan pemilu, pilkada dan pemilihan kepala desa serta penjaringan aparat desa dan BPD	15 desa
3	Memonitoring penyusunan laporan kependudukan	Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat	15 desa

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	
	1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
	1.1 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp 2,393,600.00
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 2,393,600.00</b>

Pelaihari, 20 Februari 2023

CAMAT PELAIHARI,

KASI TATA PEMERINTAHAN,

**AGUS SETIYO, SSTP, M.M**  
NIP. 19850808200412 1 001

**NURIAH, S.Sos**  
NIP. 197403201995032005





# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN PELAIHARI

Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas No. Telp. (0512) 21029 Kode Pos 70814

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KANTOR KECAMATAN PELAIHARI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HELLINDA YUSUF, S.SOS

Jabatan : Kasi Pelayanan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : AGUS SETIYO, S.STP, MM

Jabatan : Camat Pelaihari

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA  
CAMAT PELAIHARI,

**AGUS SETIYO, S.STP, MM**  
NIP. 19850808 200412 1 001

PIHAK PERTAMA  
KASI PELAYANAN,

**HELLINDA YUSUF, S.SOS**  
NIP. 19790222 200604 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN PELAIHARI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) sesuai SOP	15 pelayanan
2	Memfasilitasi Penanganan Aduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang di fasilitasi	5 pengaduan
3	Menyusun data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	4 dokumen

No.                      Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Anggaran

CAMAT PELAIHARI,



**AGUS SETIYO, SSTP, MM**  
NIP. 19850808 200412 1 001

Pelaihari, 09 Januari 2023

KASI PELAYANAN,



**HELLINDA YUSUF, S.SOS**  
NIP. 19790222 200604 2 012



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN PELAIHARI

Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas No. Telp. (0512) 21029 Kode Pos 70814

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. SYAFRIANDI NOOR, SE

Jabatan : Kasi Kemasyarakatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : AGUS SETIYO, S.STP, MM

Jabatan : Camat Pelaihari

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA  
CAMAT PELAIHARI,

**AGUS SETIYO, S.STP, MM**  
NIP. 19850808 200412 1 001

Pelaihari, 13 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA  
KASI KEMASYARAKATAN,

**M. SYAFRIANDI NOOR**  
NIP. 19770121 200701 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN PELAIHARI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Memberikan pembinaan kepada kelompok organisasi masyarakat dibidang kemasyarakatan	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan	15 kelompok
2	Memfasilitasi kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga di tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP	15 kegiatan
3	Memfasilitasi penyaluran bantuan sosial di kecamatan	Jumlah masyarakat tidak mampu yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial	1000 orang

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

No	Proram	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp 1.209.373.308,00
		- Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Antar Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Rp 1.209.373.308,00

CAMAT PELAIHARI,



**AGUS SETIYO, SSTP, M.M**  
NIP. 19850808 200412 1 001

Pelaihari, 13 Oktober 2023

KASI KEMASYARAKATAN,



**M.SYAFRIANDI NOOR, SE**  
NIP. 19770121 200701 1 006



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN PELAIHARI

Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagah No. Telp. (0512) 21029 Kode Pos 70814

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENNY SUSILAWATI, A.Md

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. NOORDIANSYAH, SKM, M.Kes

Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS CAMAT,

**M. NOORDIANSYAH, SKM. M.Kes**  
NIP. 19671013 198803 1 004

PIHAK PERTAMA

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN,

**ENNY SUSILAWATI, A.Md**  
NIP. 19820125 200901 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN PELAIHARI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Memberikan Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik	18 orang
2	Memenuhi sarana dan prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	223 unit
3	Memberikan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	18 Dokumen

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

No	Proram	Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 447.492.214,00
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 7.262.410,00
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 152.254.824,00
		- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 30.806.502,00
		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 11.451.038,00
		- Penyediaan Bahan/Material	Rp 9.967.440,00
		- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 750.000,00
		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 235.000.000,00
		2 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 237.127.984,00
		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 41.050.000,00
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 196.077.984,00
		3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 77.300.000,00
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 30.000.000,00

No	Proram	Kegiatan	Anggaran
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 40.500.000,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 6.800.000,00

Pelaihari, 13 Oktober 2023

SEKRETARIS CAMAT,

KASUBBAG. UMUM DAN Kepegawaian



M. NOORDIANSYAH, SKM, M.Kes  
NIP. 19671013 198803 1 004



ENNY SUSILAWATI, A.Md  
NIP. 19820125 200901 2 001



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN PELAIHARI

Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas No. Telp. (0512) 21029 Kode Pos 70814

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINNI AULIA, SE

Jabatan : Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : M. NOORDIANSYAH, SKM., M.Kes

Jabatan : Sekretaris Camat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2022

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS CAMAT,

**M. NOORDIANSYAH, SKM. M.Kes**  
NIP. 19671013 198803 1 004

PIHAK PERTAMA

KASUBBAG PERENCANAAN DAN  
KEUANGAN,

**RINNI AULIA, SE**  
NIP. 19830619 200604 2 015



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN PELAIHARI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Menyusun dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	7 Dokumen
2	Menyusun laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	7 Dokumen

**PROGRAM DAN KEGIATAN**

No	Proram	Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 3.985.000,00
		- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 2.825.000,00
		- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.160.000,00
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9.765.162.647,00
		- Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Rp 9.764.662.647,00
		- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 500.000,00

Pelaihari, 13 Oktober 2023

SEKRETARIS CAMAT ,



**M. NOORDIANSYAH, SKM, M.Kes**  
NIP. 19671013 198803 1 004

KASUBBAG. PERENCANAAN DAN KEUANGAN



**RINNI AULIA, SE**  
NIP. 19830619 200604 2 015



# PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

## KECAMATAN PELAIHARI

Alamat : Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas No. Telp. (0512) 21029 Kode Pos 70814

### PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIF DWI SAMPURNO, S.STP

Jabatan : Plt. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : AGUS SETIYO, S.STP, MM

Jabatan : Camat Pelaihari

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 9 Januari 2023

PIHAK KEDUA  
CAMAT PELAIHARI,

PIHAK PERTAMA  
Plt. KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DESA/KELURAHAN,

**AGUS SETIYO, S.STP, MM**  
NIP. 19850808 200412 1 001

**ARIF DWI SAMPURNO, S.STP**  
NIP. 19950301 201808 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
KECAMATAN PELAIHARI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam pemasaran hasil produksi	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	5 kelompok
2.	Memberikan pembinaan tentang penyusunan monografi kecamatan serta profil desa yang akurat	Jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik	15 desa
3.	Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang mengelola keuangan dengan baik	15 desa
4.	Fasilitasi Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan	2 kegiatan


**PROGRAM DAN KEGIATAN**

No	Proram	Kegiatan	Anggaran
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah Kecamatan	Rp 38.489.280,00
		- Peningkatan Efisiensi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Rp 38.489.280,00
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Rp 24.812.120,00
		- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp 4.812.440,00
		- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp 19.999.680,00

Pelaihari, 13 Oktober 2023

CAMAT PELAIHARI,

Plt. KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN



**AGUS SETIYO, SSTP, M.M**  
NIP. 19850808 200412 1 001



**ARIF DWI SAMPURNO, S.STP**  
NIP. 19950301 201808 1 001

**LAMPIRAN 4**  
**POHON KINERJA TAHUN**  
**2023**

**POHON KINERJA SKPD KECAMATAN PELAIHARI**

**Kinerja Camat**  
1. Peningkatan kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat  
**Indikator Kinerja :**  
1. Indek kepuasan Masyarakat

**Kinerja Sekcam**  
1. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja  
2. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian  
3. Meningkatnya Tata Kelola Perencanaan Pelaporan Keuangan SKPD  
**Indikator Kinerja :**  
1. Nilai RB, Nilai SAKIP, Nilai Zona Integritas  
2. Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib sesuai SOP  
3. Persentase Pengelolaan Perencanaan Pelaporan Keuangan yang Tertib dan Tepat Waktu

**Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian :**  
1. Memberikan pelayanan administrasi perkantoran  
2. Pemenuhan sarana dan prasarana Kantor  
3. Memberikan Pelayanan administrasi Kepegawaian  
**Indikator Kinerja :**  
1. Jumlah ASN yang administrasinya terlayani dengan baik  
2. Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik  
3. Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian

**Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Keuangan :**  
1. Menyusun dokumen perencanaan Kinerja dan perencanaan Keuangan  
2. menyusun laporan Kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan  
**Indikator Kinerja :**  
1. Jumlah Dokumen perencanaan Kinerja dan perencanaan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku.  
2. Jumlah laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan

**Kinerja Kasi Pemerintahan**  
1. Memfasilitasi pengelolaan administrasi pemerintahan desa dan BPD  
2. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, pilkada, dan pemilihan kepala desa serta penjarangan aparat desa dan BPD  
3. Memonitoring penyusunan laporan kependudukan  
4. Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Kepemimpinan  
**Indikator Kinerja :**  
1. Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik  
2. Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan pemilu, pilkada, dan pemilihan kepala desa serta penjarangan aparat desa dan BPD  
3. Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat  
4. Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Kepemimpinan

**Kinerja Kasi Kemasyarakatan**  
1. Memberikan Pembinaan Kepada kelompok organisasi masyarakat di bidang kemasyarakatan  
2. Memfasilitasi kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga di tingkat kecamatan  
3. Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial di kecamatan  
**Indikator Kinerja :**  
1. Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina di bidang sosial,  
2. Jumlah kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP.  
3. Jumlah masyarakat tidak mampu yang di fasilitasi penyaluran bantuan sosialnya

**Kinerja Kasi PMD**  
1. Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam pemasaran hasil produksi.  
2. Memberikan Pembinaan tentang penyusunan monografi kecamatan serta profil desa yang akurat.  
3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa  
4. Fasilitasi Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan  
**Indikator Kinerja :**  
1. Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya  
2. Jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik  
3. Jumlah desa yang mengelola keuangannya dengan baik  
4. Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang Tingkat Kecamatan

**Kinerja Kasi Trantib**  
1. Memfasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan  
2. Membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban  
3. Monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan  
4. Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang dimonitoring  
**Indikator Kinerja :**  
1. Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat d kecamatan yang di fasilitasi  
2. Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif  
3. Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring  
4. Jumlah sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang dimonitoring

**Kinerja Kasi Pelayanan**  
1. Memberikan Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)  
2. memfasilitasi penanganan aduan masyarakat  
3. Menyusun data informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)  
**Indikator Kinerja :**  
1. Jumlah Pelayanan Masyarakat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP  
2. Jumlah pengaduan masyarakat yang difasilitasi  
3. Jumlah data informasi Pelayanan Administrasi TerpaduKecamatan (PATEN)

Pelaihari, Januari 2023  
Camat Pelaihari.



**AGUS SETIYO, SSTP, MM**  
**NIP. 19850808 200412 1 001**

**LAMPIRAN 5**  
**CAPAIAN PERTRIWULAN**  
**(1-4)**

**LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN**  
**Tahun Anggaran 2023**  
**TRIWULAN I**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw I		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.257.573.434,00</b>	<b>10.531.067.845,00</b>	24,35%	2.564.393.366,00	25,43%	1.840.632.159,00	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.985.000,00</b>	<b>3.985.000,00</b>	25,00%	996.250,00	32,82%	860.000,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.985.000,00	2.825.000,00	17,57%	496.250,00	46,30%	860.000,00	30,44%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.160.000,00	43,10%	500.000,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.645.162.647,00</b>	<b>9.765.162.647,00</b>	24,69%	2.411.290.664,00	25,00%	1.699.823.578,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.644.662.647,00	9.764.662.647,00	24,69%	2.411.165.664,00	25,00%	1.699.823.578,00	17,41%
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500.000,00	500.000,00	25,00%	125.000,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>315.683.299,00</b>	<b>447.492.214,00</b>	17,64%	78.920.830,00	34,29%	69.008.099,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.262.410,00	7.262.410,00	25,00%	1.815.604,00	0,00%	0,00	0,00%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.590.204,00	152.254.824,00	20,46%	31.147.551,00	50,00%	20.699.500,00	13,60%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.629.647,00	30.806.502,00	5,38%	1.657.414,00	35,00%	722.300,00	2,34%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.451.038,00	11.451.038,00	25,00%	2.862.761,00	25,00%	745.000,00	6,51%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0,00	9.967.440,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	750.000,00	750.000,00	25,00%	187.500,00	0,00%	0,00	0,00%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.000.000,00	235.000.000,00	17,55%	41.250.000,00	27,10%	46.841.299,00	19,93%
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>215.442.488,00</b>	<b>237.127.984,00</b>	22,71%	53.860.622,00	26,88%	56.912.982,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.050.000,00	41.050.000,00	21,95%	9.012.500,00	25,00%	8.124.843,00	19,79%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.392.488,00	196.077.984,00	22,87%	44.848.122,00	27,27%	48.788.139,00	24,88%
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>77.300.000,00</b>	<b>77.300.000,00</b>	25,00%	19.325.000,00	23,97%	14.027.500,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	30.000.000,00	25,00%	7.500.000,00	25,00%	5.500.700,00	18,34%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.500.000,00	40.500.000,00	25,00%	10.125.000,00	25,00%	7.626.800,00	18,83%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.800.000,00	6.800.000,00	25,00%	1.700.000,00	13,24%	900.000,00	13,24%

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw I		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>38.489.280,00</b>	<b>38.489.280,00</b>	25,00%	9.622.320,00	3,30%	1.137.440,00	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>38.489.280,00</b>	<b>38.489.280,00</b>	25,00%	9.622.320,00	3,30%	1.137.440,00	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38.489.280,00	38.489.280,00	25,00%	9.622.320,00	3,30%	1.137.440,00	2,96%
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>7.965.540,00</b>	<b>7.965.540,00</b>	25,00%	1.991.385,00	0,00%	0,00	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>7.965.540,00</b>	<b>7.965.540,00</b>	25,00%	1.991.385,00	0,00%	0,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.965.540,00	7.965.540,00	25,00%	1.991.385,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>1.276.486.418,00</b>	<b>1.257.786.418,00</b>	25,37%	319.121.606,00	0,48%	205.865.000,00	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>1.276.486.418,00</b>	<b>1.257.786.418,00</b>	25,37%	319.121.606,00	0,48%	205.865.000,00	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.214.073.308,00	1.209.373.308,00	25,10%	303.518.327,00	0,00%	202.940.000,00	16,78%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	62.413.110,00	48.413.110,00	32,23%	15.603.279,00	12,50%	2.925.000,00	6,04%
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>27.205.720,00</b>	<b>27.205.720,00</b>	25,00%	6.801.430,00	73,51%	16.635.000,00	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>27.205.720,00</b>	<b>27.205.720,00</b>	25,00%	6.801.430,00	73,51%	16.635.000,00	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.812.440,00	4.812.440,00	25,00%	1.203.110,00	0,00%	0,00	0,00%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.393.600,00	2.393.600,00	25,00%	598.400,00	0,00%	0,00	0,00%
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19.999.680,00	19.999.680,00	25,00%	4.999.920,00	100,00%	16.635.000,00	83,18%
		<b>11.607.720.392</b>	<b>11.862.514.803</b>	<b>24,46%</b>	<b>2.901.930.107</b>	<b>22,81%</b>	<b>2.064.269.599</b>	<b>17,40%</b>



**LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN**  
**Tahun Anggaran 2023**  
**TRIWULAN II**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.257.573.434,00</b>	<b>10.531.067.845,00</b>	48,71%	5.128.786.722,00	50,12%	5.416.244.812,00	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.985.000,00</b>	<b>3.985.000,00</b>	50,00%	1.992.500,00	47,38%	1.960.000,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.985.000,00	2.825.000,00	35,13%	992.500,00	46,30%	860.000,00	30,44%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.160.000,00	86,21%	1.000.000,00	50,00%	1.100.000,00	94,83%
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.645.162.647,00</b>	<b>9.765.162.647,00</b>	49,39%	4.822.581.325,00	50,00%	5.061.344.401,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.644.662.647,00	9.764.662.647,00	49,39%	4.822.331.325,00	50,00%	5.061.344.401,00	51,83%
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500.000,00	500.000,00	50,00%	250.000,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>315.683.299,00</b>	<b>447.492.214,00</b>	35,28%	157.841.653,00	49,93%	210.324.699,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.262.410,00	7.262.410,00	50,00%	3.631.206,00	50,00%	2.480.500,00	34,16%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.590.204,00	152.254.824,00	40,92%	62.295.102,00	62,50%	79.974.500,00	52,53%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.629.647,00	30.806.502,00	10,76%	3.314.825,00	35,00%	2.435.300,00	7,91%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.451.038,00	11.451.038,00	50,00%	5.725.520,00	50,00%	3.963.000,00	34,61%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0,00	9.967.440,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	750.000,00	750.000,00	50,00%	375.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.000.000,00	235.000.000,00	35,11%	82.500.000,00	45,70%	120.721.399,00	51,37%
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>215.442.488,00</b>	<b>237.127.984,00</b>	45,43%	107.721.244,00	53,72%	113.351.162,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.050.000,00	41.050.000,00	43,91%	18.025.000,00	50,00%	15.610.724,00	38,03%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.392.488,00	196.077.984,00	45,75%	89.696.244,00	54,50%	97.740.438,00	49,85%
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>77.300.000,00</b>	<b>77.300.000,00</b>	50,00%	38.650.000,00	56,42%	29.264.550,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	30.000.000,00	50,00%	15.000.000,00	50,00%	11.327.200,00	37,76%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.500.000,00	40.500.000,00	50,00%	20.250.000,00	66,70%	15.887.350,00	39,23%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.800.000,00	6.800.000,00	50,00%	3.400.000,00	23,50%	2.050.000,00	30,15%

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>38.489.280,00</b>	<b>38.489.280,00</b>	50,00%	19.244.640,00	20,00%	14.311.910,00	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>38.489.280,00</b>	<b>38.489.280,00</b>	50,00%	19.244.640,00	20,00%	14.311.910,00	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38.489.280,00	38.489.280,00	50,00%	19.244.640,00	20,00%	14.311.910,00	37,18%
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>7.965.540,00</b>	<b>7.965.540,00</b>	50,00%	3.982.770,00	0,00%	0,00	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>7.965.540,00</b>	<b>7.965.540,00</b>	50,00%	3.982.770,00	0,00%	0,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.965.540,00	7.965.540,00	50,00%	3.982.770,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>1.276.486.418,00</b>	<b>1.257.786.418,00</b>	50,74%	638.243.210,00	78,85%	711.731.090,00	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>1.276.486.418,00</b>	<b>1.257.786.418,00</b>	50,74%	638.243.210,00	78,85%	711.731.090,00	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.214.073.308,00	1.209.373.308,00	50,19%	607.036.654,00	80,00%	693.116.560,00	57,31%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	62.413.110,00	48.413.110,00	64,46%	31.206.556,00	50,00%	18.614.530,00	38,45%
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>27.205.720,00</b>	<b>27.205.720,00</b>	50,00%	13.602.860,00	91,20%	21.210.000,00	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>27.205.720,00</b>	<b>27.205.720,00</b>	50,00%	13.602.860,00	91,20%	21.210.000,00	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.812.440,00	4.812.440,00	50,00%	2.406.220,00	100,00%	4.575.000,00	95,07%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.393.600,00	2.393.600,00	50,00%	1.196.800,00	0,00%	0,00	0,00%
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19.999.680,00	19.999.680,00	50,00%	9.999.840,00	100,00%	16.635.000,00	83,18%
		<b>11.607.720.392</b>	<b>11.862.514.803</b>	<b>48,93%</b>	<b>5.803.860.202</b>	<b>53,13%</b>	<b>6.163.497.812</b>	<b>51,96%</b>

**LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN**  
**Tahun Anggaran 2023**  
**TRIWULAN III**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw III		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.257.573.434,00</b>	<b>10.531.067.845,00</b>	73,05%	7.692.840.078,00	82,78%	7.464.845.504,00	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.985.000,00</b>	<b>3.985.000,00</b>	66,47%	2.648.750,00	47,38%	1.960.000,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.985.000,00	2.825.000,00	52,70%	1.488.750,00	46,30%	860.000,00	30,44%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.160.000,00	100,00%	1.160.000,00	50,00%	1.100.000,00	94,83%
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.645.162.647,00</b>	<b>9.765.162.647,00</b>	74,08%	7.233.871.986,00	83,30%	7.002.914.592,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.644.662.647,00	9.764.662.647,00	74,08%	7.233.496.986,00	83,30%	7.002.664.592,00	71,71%
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500.000,00	500.000,00	75,00%	375.000,00	80,00%	250.000,00	50,00%
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>315.683.299,00</b>	<b>447.492.214,00</b>	52,91%	236.762.476,00	71,74%	240.850.787,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.262.410,00	7.262.410,00	75,00%	5.446.808,00	50,00%	2.480.500,00	34,16%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.590.204,00	152.254.824,00	61,37%	93.442.653,00	87,50%	85.268.500,00	56,00%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.629.647,00	30.806.502,00	16,14%	4.972.236,00	35,00%	2.435.300,00	7,91%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.451.038,00	11.451.038,00	75,00%	8.588.279,00	100,00%	6.004.000,00	52,43%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0,00	9.967.440,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	750.000,00	750.000,00	75,00%	562.500,00	100,00%	750.000,00	100,00%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.000.000,00	235.000.000,00	52,66%	123.750.000,00	68,60%	143.912.487,00	61,24%
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>215.442.488,00</b>	<b>237.127.984,00</b>	68,14%	161.581.866,00	80,62%	171.337.175,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.050.000,00	41.050.000,00	65,86%	27.037.500,00	75,00%	24.972.758,00	60,83%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.392.488,00	196.077.984,00	68,62%	134.544.366,00	81,80%	146.364.417,00	74,65%
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>77.300.000,00</b>	<b>77.300.000,00</b>	75,00%	57.975.000,00	89,70%	47.782.950,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	30.000.000,00	75,00%	22.500.000,00	100,00%	17.343.200,00	57,81%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.500.000,00	40.500.000,00	75,00%	30.375.000,00	83,30%	25.039.750,00	61,83%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.800.000,00	6.800.000,00	75,00%	5.100.000,00	82,40%	5.400.000,00	79,41%
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>38.489.280,00</b>	<b>38.489.280,00</b>	75,00%	28.866.960,00	26,70%	20.904.230,00	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>38.489.280,00</b>	<b>38.489.280,00</b>	75,00%	28.866.960,00	26,70%	20.904.230,00	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38.489.280,00	38.489.280,00	75,00%	28.866.960,00	26,70%	20.904.230,00	54,31%
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>7.965.540,00</b>	<b>7.965.540,00</b>	75,00%	5.974.155,00	100,00%	7.705.000,00	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw III		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>7.965.540,00</b>	<b>7.965.540,00</b>	75,00%	5.974.155,00	100,00%	7.705.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.965.540,00	7.965.540,00	75,00%	5.974.155,00	100,00%	7.705.000,00	96,73%
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>1.276.486.418,00</b>	<b>1.257.786.418,00</b>	76,11%	957.364.814,00	99,04%	1.037.677.220,00	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>1.276.486.418,00</b>	<b>1.257.786.418,00</b>	76,11%	957.364.814,00	99,04%	1.037.677.220,00	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.214.073.308,00	1.209.373.308,00	75,29%	910.554.981,00	100,00%	1.002.931.560,00	82,93%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	62.413.110,00	48.413.110,00	96,69%	46.809.833,00	75,00%	34.745.660,00	71,77%
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>27.205.720,00</b>	<b>27.205.720,00</b>	75,00%	20.404.290,00	100,00%	23.350.000,00	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>27.205.720,00</b>	<b>27.205.720,00</b>	75,00%	20.404.290,00	100,00%	23.350.000,00	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.812.440,00	4.812.440,00	75,00%	3.609.330,00	100,00%	4.575.000,00	95,07%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.393.600,00	2.393.600,00	75,00%	1.795.200,00	100,00%	2.140.000,00	89,41%
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19.999.680,00	19.999.680,00	75,00%	14.999.760,00	100,00%	16.635.000,00	83,18%
		<b>11.607.720.392</b>	<b>11.862.514.803</b>	<b>73,39%</b>	<b>8.705.450.297</b>	<b>84,37%</b>	<b>8.554.481.954</b>	<b>72,11%</b>

**LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN**  
**Tahun Anggaran 2023**  
**TRIWULAN IV**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>10.257.573.434,00</b>	<b>10.531.067.845,00</b>	100,00%	10.531.067.845,00	99,93%	9.669.023.077,00	
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>3.985.000,00</b>	<b>3.985.000,00</b>	100,00%	3.985.000,00	100,00%	3.925.000,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.985.000,00	2.825.000,00	100,00%	2.825.000,00	100,00%	2.825.000,00	100,00%
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000,00	1.160.000,00	100,00%	1.160.000,00	100,00%	1.100.000,00	94,83%
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.645.162.647,00</b>	<b>9.765.162.647,00</b>	100,00%	9.765.162.647,00	100,00%	8.937.602.114,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.644.662.647,00	9.764.662.647,00	100,00%	9.764.662.647,00	100,00%	8.937.102.114,00	91,52%
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>315.683.299,00</b>	<b>447.492.214,00</b>	100,00%	447.492.214,00	98,27%	420.022.456,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.262.410,00	7.262.410,00	100,00%	7.262.410,00	100,00%	6.534.500,00	89,98%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.590.204,00	152.254.824,00	100,00%	152.254.824,00	100,00%	134.211.068,00	88,15%
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.629.647,00	30.806.502,00	100,00%	30.806.502,00	100,00%	26.606.445,00	86,37%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.451.038,00	11.451.038,00	100,00%	11.451.038,00	100,00%	9.031.000,00	78,87%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	0,00	9.967.440,00	100,00%	9.967.440,00	100,00%	8.905.000,00	89,34%
7.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	750.000,00	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	165.000.000,00	235.000.000,00	100,00%	235.000.000,00	96,70%	233.984.443,00	99,57%
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>215.442.488,00</b>	<b>237.127.984,00</b>	100,00%	237.127.984,00	100,00%	232.014.363,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.050.000,00	41.050.000,00	100,00%	41.050.000,00	100,00%	36.533.487,00	89,00%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	179.392.488,00	196.077.984,00	100,00%	196.077.984,00	100,00%	195.480.876,00	99,70%
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>77.300.000,00</b>	<b>77.300.000,00</b>	100,00%	77.300.000,00	100,00%	75.459.144,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	29.988.500,00	99,96%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.500.000,00	40.500.000,00	100,00%	40.500.000,00	100,00%	38.670.644,00	95,48%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.800.000,00	6.800.000,00	100,00%	6.800.000,00	100,00%	6.800.000,00	100,00%
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>38.489.280,00</b>	<b>38.489.280,00</b>	100,00%	38.489.280,00	100,00%	29.915.670,00	
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>38.489.280,00</b>	<b>38.489.280,00</b>	100,00%	38.489.280,00	100,00%	29.915.670,00	
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	38.489.280,00	38.489.280,00	100,00%	38.489.280,00	100,00%	29.915.670,00	77,72%

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Keuangan	
							Rp	%
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>7.965.540,00</b>	<b>7.965.540,00</b>	100,00%	7.965.540,00	100,00%	7.705.000,00	
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>7.965.540,00</b>	<b>7.965.540,00</b>	100,00%	7.965.540,00	100,00%	7.705.000,00	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.965.540,00	7.965.540,00	100,00%	7.965.540,00	100,00%	7.705.000,00	96,73%
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>1.276.486.418,00</b>	<b>1.257.786.418,00</b>	100,00%	1.257.786.418,00	100,00%	1.174.952.220,00	
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>1.276.486.418,00</b>	<b>1.257.786.418,00</b>	100,00%	1.257.786.418,00	100,00%	1.174.952.220,00	
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.214.073.308,00	1.209.373.308,00	100,00%	1.209.373.308,00	100,00%	1.126.931.560,00	93,18%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	62.413.110,00	48.413.110,00	100,00%	48.413.110,00	100,00%	48.020.660,00	99,19%
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>27.205.720,00</b>	<b>27.205.720,00</b>	100,00%	27.205.720,00	100,00%	23.350.000,00	
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>27.205.720,00</b>	<b>27.205.720,00</b>	100,00%	27.205.720,00	100,00%	23.350.000,00	
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.812.440,00	4.812.440,00	100,00%	4.812.440,00	100,00%	4.575.000,00	95,07%
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2.393.600,00	2.393.600,00	100,00%	2.393.600,00	100,00%	2.140.000,00	89,41%
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	19.999.680,00	19.999.680,00	100,00%	19.999.680,00	100,00%	16.635.000,00	83,18%
		<b>11.607.720.392</b>	<b>11.862.514.803</b>	<b>100,00%</b>	<b>11.862.514.803</b>	<b>99,93%</b>	<b>10.904.945.967</b>	<b>91,93%</b>

**LAMPIRAN 6**  
**MONEV RENSTRA**

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14/4*100	17 = 15/5*100
<b>KECAMATAN PELAIHARI</b>																
A.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			10.531.067.845		1.840.632.159		3.575.612.653		2.048.600.692		2.204.177.573		9.669.023.077		91,81%
1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			3.985.000		860.000		1.100.000		-		1.965.000		3.925.000		98,49%
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan (Dokumen)	5	2.825.000	3	860.000	-	-	-	-	2	1.965.000	5	2.825.000	100,00%	100,00%
b.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	4	1.160.000	4	-	-	1.100.000	-	-	-	-	4	1.100.000	100,00%	94,83%
2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			9.765.162.647		1.699.823.578		3.361.520.823		1.941.570.191		1.934.687.522		8.937.602.114		91,53%
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang di bayarkan gaji dan tunjangan (orang)	77	9.764.662.647	-	1.699.823.578	-	3.361.520.823	-	1.941.320.191	77	1.934.437.522	77	8.937.102.114	100,00%	91,52%
b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun* (dokumen)	5	500.000	-	-	-	-	-	250.000	5	250.000	5	500.000	100,00%	100,00%
3.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			447.492.214		69.008.099		141.316.600		30.526.088		179.171.669		420.022.456		93,86%
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	7.262.410	1	-	1	2.480.500	1	-	1	4.054.000	1	6.534.500	100,00%	89,98%
b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	33	152.254.824	15	20.699.500	20	59.275.000	25	5.294.000	33	48.942.568	33	134.211.068	100,00%	88,15%
c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	*Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	20	30.806.502	5	722.300	10	1.713.000	15	-	20	24.171.145	20	26.606.445	100,00%	86,37%
d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	11.451.038	2	745.000	2	3.218.000	2	2.041.000	2	3.027.000	2	9.031.000	100,00%	78,87%
e.	Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	8	9.967.440	-	-	-	-	-	-	8	8.905.000	8	8.905.000	100,00%	89,34%
f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1	750.000	1	-	1	750.000	1	-	1	-	1	750.000	100,00%	100,00%
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	90	235.000.000	25	46.841.299	27	73.880.100	28	23.191.088	7	90.071.956	87	233.984.443	96,67%	99,57%



Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14/4*100	17 = 15/5*100	
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)															
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			237.127.984		56.912.982		56.438.180		57.986.013		60.677.188		232.014.363		97,84%	
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	41.050.000	3	8.124.843	3	7.485.881	3	9.362.034	3	11.560.729	12	36.533.487	100,00%	89,00%	
b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	196.077.984	3	48.788.139	3	48.952.299	3	48.623.979	3	49.116.459	12	195.480.876	100,00%	99,70%	
4.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			77.300.000		14.027.500		15.237.050		18.518.400		27.676.194		75.459.144		97,62%	
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara* (unit)	1	30.000.000	1	5.500.700	1	5.826.500	1	6.016.000	1	12.645.300	1	29.988.500	100,00%	99,96%	
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara* (unit)	6	40.500.000	6	7.626.800	6	8.260.550	6	9.152.400	6	13.630.894	6	38.670.644	100,00%	95,48%	
c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara* (unit)	17	6.800.000	5	900.000	8	1.150.000	13	3.350.000	17	1.400.000	17	6.800.000	100,00%	100,00%	
B.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			38.489.280		1.137.440		13.174.470		6.592.320		9.011.440		29.915.670		77,72%	
1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			38.489.280		1.137.440		13.174.470		6.592.320		9.011.440		29.915.670		77,72%	
a.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	*Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	38.489.280	3	1.137.440	6	13.174.470	9	6.592.320	12	9.011.440	12	29.915.670	100,00%	77,72%	
C.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			7.965.540		-		-		7.705.000		-		7.705.000		96,73%	
1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			7.965.540		-		-		7.705.000		-		7.705.000		96,73%	
a.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	*Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan	1	7.965.540	-	-	1	-	-	7.705.000	-	-	1	7.705.000	100,00%	96,73%	

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14/4*100	17 = 15/5*100	
	Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)															
<b>D.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>			1.257.786.418		205.865.000		505.866.090		325.946.130		137.275.000		1.174.952.220		93,41%	
1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			1.257.786.418		205.865.000		505.866.090		325.946.130		137.275.000		1.174.952.220		93,41%	
a.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional (Orang)	500	1.209.373.308	-	202.940.000	500	490.176.560	-	309.815.000	-	124.000.000	500	1.126.931.560	100,00%	93,18%	
b.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	*Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	8	48.413.110	2	2.925.000	4	15.689.530	6	16.131.130	8	13.275.000	8	48.020.660	100,00%	99,19%	
<b>E.</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			27.205.720		16.635.000		4.575.000		2.140.000		-		23.350.000		85,83%	
1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			27.205.720		16.635.000		4.575.000		2.140.000		-		23.350.000		85,83%	
a.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	*Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	15	4.812.440	15	-	15	4.575.000	15	-	15	-	15	4.575.000	100,00%	95,07%	
b.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	*Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	1	2.393.600	-	-	-	-	1	2.140.000	-	-	1	2.140.000	100,00%	89,41%	
c.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kecamatan (Kali)	2	19.999.680	2	16.635.000	-	-	-	-	-	-	2	16.635.000	100,00%	83,18%	

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 14/4*100	17 = 15/5*100

**KELURAHAN ANGSAU**

<b>A.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			380.032.016		89.639.986		57.841.907		44.884.063		129.679.903		322.045.859		84,74%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja berkualitas* (%)	2	5.323.560	1	-	-	1.074.000	-	-	1	300.000	2	1.374.000	100,00%	25,81%
a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun* ( )	2	5.323.560	-	-	2	1.074.000	-	-	-	300.000	2	1.374.000	100,00%	25,81%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	1.999.800	-	-	4	-	-	1.999.800	-	-	4	1.999.800	100,00%	100,00%
a.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	4	1.999.800	-	-	-	-	4	1.999.800	-	-	4	1.999.800	100,00%	100,00%
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah (Dokumen)	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	100,00%	0,00%
a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-		-		-		-		-		0,00%
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah* (%)	1	53.546.881	1	9.162.300	-	18.191.093	-	5.992.000	-	16.571.315	1	49.916.708	100,00%	93,22%
a.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan* (unit)	1	15.375.182	-	5.178.500	1	7.738.180	-	-	-	-	1	12.916.680	100,00%	84,01%
b.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan* (unit)	1	4.904.491	1	3.983.800	-	-	-	-	-	-	1	3.983.800	100,00%	81,23%
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan* (unit)	1	430.980	1	-	-	330.000	-	-	-	-	1	330.000	100,00%	76,57%
d.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* (kali)	5	32.836.228	-	-	3	10.122.913	-	5.992.000	2	16.571.315	5	32.686.228	100,00%	99,54%
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	4	123.269.685	4	45.887.900	-	-	-	-	-	58.498.000	4	104.385.900	100,00%	84,68%

**LAMPIRAN 7**  
**MATRIKS KESELARASAN**

TABEL KESELARASAN KECAMATAN PELAIHARI TAHUN 2023

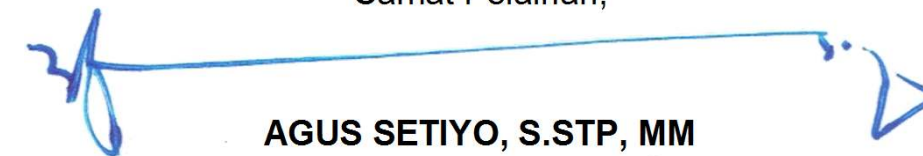
NO	LAPKIN 2023						RENSTRA 2018 - 2023 (BAB IV)						PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023			Cashcading 2023		Pengampu	Keterangan				
	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	kinerja			Indikator	Target	Sasaran	Indikator
1	Terwujudnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	IKM	Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	80%	Terwujudnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	IKM	Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	70%	72%	75%	80%	80%	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	90%	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan	Camat	
2	Terwujudnya Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik	Indek RB	60	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	60 (CC)	Terwujudnya Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik	Indek RB	60	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	45 (C)	46 (C)	50 (C)	60 (C)	60 (C)	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	60 (CC)	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	Sekcam	
					Nilai SAKIP	83 (A)					Nilai SAKIP	72 (BB)	75 (BB)	80 (A)	82 (A)	83 (A)		Nilai SAKIP	83 (A)		Nilai SAKIP		
					Nilai Zona Integritas	52					Nilai Zona Integritas	49	49	50	51	52		Nilai Zona Integritas	52		Nilai Zona Integritas		
3	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Persentase Pengelolaan administrasi Perkantoran dan Kepegawaian dan Perencanaan Keuangan yang tertib	100%	meningkatnya pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib sesuai SOP	100%	Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien	Presentase pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian, perencanaan keuangan yang tertib	100%	meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase layanan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	100%	100%	100%	100%	meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Presentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	100%	meningkatnya kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Presentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib	Sekcam	
				Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Persentase pengelolan perencanaan pelaporan keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%				Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Persentase pengelolan perencanaan pelaporan keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Persentase pengelolan perencanaan pelaporan keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%	Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Persentase pengelolan perencanaan pelaporan keuangan yang tertib dan tepat waktu		
																	Menyusun dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	7 dokumen	Menyusun dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	
																	Menyusun laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku	7 dokumen	Menyusun laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
																	Memberikan Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah ASN yang administrasi perkantornya terlayani dengan baik	18 Orang	Memberikan Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah ASN yang administrasi perkantornya terlayani dengan baik	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
																	Pemenuhan sarana dan prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	223 unit	Pemenuhan sarana dan prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik		
																	Memberikan Pelayanan administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	18 Dokumen	Memberikan Pelayanan administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		
																	Memfasilitasi pengelolaan administrasi pemerintah desa dan BPD	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	15 desa	Memfasilitasi pengelolaan administrasi pemerintah desa dan BPD	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	Kasi Tata Pemerintahan	

NO	LAPKIN 2023						RENSTRA 2018 - 2023 (BAB IV)										PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023			Cashcading 2023		Pengampu	Keterangan
	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	kinerja	Indikator	Target	Sasaran	Indikator		
																	Memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, pilkada dan pemilihan kepala desa serta penjarangan aparat desa dan BPD	Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan pemilu, pilkada dan pemilihan kepala desa serta penjarangan aparat desa dan BPD	15 desa	Memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, pilkada dan pemilihan kepala desa serta penjarangan aparat desa dan BPD	Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan pemilu, pilkada dan pemilihan kepala desa serta penjarangan aparat desa dan BPD		
																	Memonitoring penyusunan laporan kependudukan	Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat	15 desa	Memonitoring penyusunan laporan kependudukan	Jumlah desa yang data kependudukannya terverifikasi dengan akurat		
																	Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam pemasaran hasil produksi	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	5 kelompok	Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam pemasaran hasil produksi	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	Kasi PMD/K	
																	Memberikan pembinaan tentang penyusunan monografi kecamatan serta profil desa yang akurat	Jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik	15 Desa	Memberikan pembinaan tentang penyusunan monografi kecamatan serta profil desa yang akurat	Jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik		
																	Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang mengelola keuangan dengan baik	15 Desa	Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang mengelola keuangan dengan baik		
																	Fasilitasi kegiatan Musrenbang Tingkat kecamatan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan	2 Kali	Fasilitasi kegiatan Musrenbang Tingkat kecamatan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat kecamatan		
																	Memberikan pembinaan kepada kelompok organisasi masyarakat dibidang kemasyarakatan	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan	15 Kelompok	Memberikan pembinaan kepada kelompok organisasi masyarakat dibidang kemasyarakatan	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina di bidang kemasyarakatan	Kasi Kemasyarakatan	
																	Memfasilitasi kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga di tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP	15 Kegiatan	Memfasilitasi kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga di tingkat kecamatan	Jumlah kegiatan di bidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP		

NO	LAPKIN 2023						RENSTRA 2018 - 2023 (BAB IV)										PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023			Cashcading 2023		Pengampu	Keterangan
	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	kinerja	Indikator	Target	Sasaran	Indikator		
																	memfasilitasi penyaluran bantuan sosial di kecamatan	Jumlah masyarakat tidak mampu yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial	1000 orang	memfasilitasi penyaluran bantuan sosial di kecamatan	Jumlah masyarakat tidak mampu yang difasilitasi penyaluran bantuan sosial		
																	Memfasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang difasilitasi	2 kejadian	Memfasilitasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	Jumlah penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang difasilitasi	Kasi Keamanan dan Ketertiban	
																	membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban	Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif	10 Kelompok	membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban	Jumlah kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif		
																	Monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring	2 Kejadian	Monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring		
																	Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang dimonitoring	jumlah sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring	1 Kegiatan	Melakukan sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang dimonitoring	jumlah sosialisasi penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan yang di monitoring		
																	Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	2 Kali	Fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan kepemimpinan		
																	Memberikan Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) sesuai SOP	15 Pelayanan	Memberikan Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah pelayanan terpadu kecamatan (PATEN) sesuai SOP	Kasi Pelayanan	

NO	LAPKIN 2023						RENSTRA 2018 - 2023 (BAB IV)										PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023			Cashcading 2023		Pengampu	Keterangan
	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023	kinerja	Indikator	Target	Sasaran	Indikator		
																	Memfasilitasi penanganan aduan masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang di fasilitasi	5 Pengaduan	Memfasilitasi penanganan aduan masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang di fasilitasi		
																	Menyusun data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	4 Dokumen	Menyusun data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	Jumlah data informasi Pelayanan Administrasi terpadu kecamatan (PATEN)		

Pelaihari, Januari 2024  
Camat Pelaihari,



**AGUS SETIYO, S.STP, MM**  
**NIP. 19850808 200412 1 001**